

**“BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT WARGA
PANULARAN TERHADAP PROGRAM TERPADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF
GENDER (P2MBG) DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA”**



Yohanes Pandhu Indrarko

D 0307016

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

compi user
2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing,



Eva Agustinawati, S.Sos, M.Si
NIP.19700813 199512 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

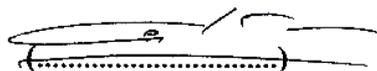
Surakarta

Pada Hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Dr. Mahendra Wijaya, MS
NIP.19600723 198702 1 001



2. Drs. T.A. Gutama, M.Si
NIP.19560911 198602 1 001



3. Eva Agustinawati, S.Sos, M.Si
NIP.197008131 99512 2 001



Disahkan Oleh : *

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan,



Prof. Drs. Pawito, Ph.D

NIP.195408051985031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini tidak bisa terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan motivasi dari semua pihak, maka saya ingin mempersembahkan karya ini kepada :

Santo Yohanes Pembaptis sebagai Santo pelindung yang selalu melindungi sepanjang hidup kami

Untuk doa dan kasih sayang yang tak terhingga dari kedua orang tua kami (Bapak Antonius Indrartono Yulianto dan Ibu Varina G Yuliatmi)

Semua teman baik di Mudika Gereja St. Pius X, Sosiologi 2007, Smansakra 2004 dan team futsal GPI "ompol dewo" (Perum GPI)

commit to user

MOTTO

PARINGKU SIH CUKUP AWIT KUWASAKU TETELA ANA ING
SEKENGMU
(2 Korintus 12 ; 19a)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Bapa Yang Mahamurah dan Mahabaik, karena dengan limpahan kasih sayang-Nya dan terang roh kudus kita selalu diberi petunjuk, walaupun terkadang kita sendiri tidak dapat langsung memahami petunjuk tersebut, dan ketika waktu sudah berlalu barulah kita paham akan petunjuk-petunjuk-Nya.

Penulis telah selesai dalam pengerjaan skripsi dengan judul : **“BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT WARGA PANULARAN TERHADAP PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERPERSPEKTIF GENDER (P2MBG) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA”** yang semua ini dipersiapkan dan diajukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Penulis menyadari bahwa, keberhasilan dalam menyelesaikan tulisan ini tentu saja tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, dukungan serta kesempatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Dr. Bagus Haryono, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Eva Agustinawati, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingan dan pengetahuannya.
4. Drs. T.A. Gutama, M.Si, selaku pembimbing akademik sekaligus sekretaris penguji.
5. Dr. Mahendra Wijaya, MS selaku Ketua penguji.

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti serta seluruh staff Fakultas FISIP UNS yang telah membantu.
7. Ibu Endang Sri Anti Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bapermas Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan bantuan di lapangan.
8. Ibu Tiwuk yang dengan ikhlas menemani penulis di lokasi penelitian.
9. Punggyo, Dian Palupi, Galih Hapsari, Sigit, Lody, Arip, Antonia (tjah chongbuzz) serta teman teman Sosiologi angkatan 2007 Harjono, Dodik, Made, Jesica, Naomi, Bayu, Kharis, Tangguh, Ria, Zaid, Lusi, Agus, Joan, Ardi, Bagas dan teman – teman keluarga Sosiologi 2007 yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu – persatu.
10. Teman – teman Sosiologi 2004, Sosiologi 2005, Sosiologi 2006, Sosiologi 2008, Sosiologi 2009 dan Sosiologi 2010.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis membuka diri terhadap segala kritik maupun saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan laporan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Surakarta, November 2011

Yohanes Pandhu Indrarko
commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR MATRIK	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Batasan Konsep	13
1.1 Partisipasi.....	13
1.2 P2MBG.....	23
2. Penelitian Terdahulu	25

commit to user

3. Kerangka Berpikir.....	28
F. Landasan Teori....	29
1. Teori Tindakan Sosial Voluntaristik.....	29
2. Kerangka Kerja Longwe.....	32
a. Pengertian.....	32
b. Kegunaan.....	35
G. Definisi Konseptual.....	36
1. Partisipasi.....	36
2. P2MBG.....	37
3. Teknik Analisa Gender.....	37
4. Perspektif gender.....	38
H. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Lokasi Penelitian.....	39
3. Jenis Data.....	40
4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
5. Teknik Pengambilan Sampel.....	42
6. Validitas Data.....	43
7. Teknik Analisa Data.....	45
BAB II DESKRIPSI WILAYAH.....	48
A. Gambaran Umum.....	48
1. Kota Surakarta.....	48

commit to user

2. Kelurahan Panularan.....	51
2.1 Kondisi Geografis.....	51
2.2 Keadaan Penduduk.....	52
B. Deskripsi P2MBG.. ..	54
C. Peserta P2MBG di Kelurahan Panularan.....	73
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	78
A. Profil Informan	78
B. Partisipasi Masyarakat.....	82
B.1 Bentuk Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Kegiatan P2MBG	84
B.1.1 Penentuan Lokasi.....	84
B.1.2 Seleksi Peserta.....	87
B.1.3 Sosialisasi dan Keterlibatan Peserta Perempuan Maupun Laki-Laki dalam Proses Sosialisasi.....	95
B.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan P2MBG.....	115
B.2.1 Pelatihan Memasak.....	116
B.2.2 Pelatihan Menjahit.....	121
B.2.3 Pelatihan Tata Rias.....	124
B.2.4 Pelatihan Bengkel.....	126
B.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan kegiatan P2MBG.....	132

commit to user

C. Analisis Teori.....	143
C.1 Teori Tindakan Sosial Voluntaristik	143
C.2 Kerangka Kerja Longwe.....	146
BAB IV PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Implikasi	155
B.1 Implikasi Teoritis.....	155
B.2 Implikasi Metodologis.....	157
B.3 Implikasi Empirik.....	159
C. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Banyaknya Penduduk Usia Sekolah Menurut Partisipasi Sekolah Dan jenis Kelamin di Kota Surakarta tahun 2009.....	4
Tabel 1.2 Banyaknya tenaga kerja Produksi dan Lainnya menurut kelompok Industri dan jenis kelamin di Kota Surakarta tahun survei 2009.....	5
Tabel 1.3 Indek Pembangunan Manusia, Indek Pembangunan gender dan Indek Pemberdayaan gender Menurut Provinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun 2004 –2007.....	7
Tabel 1.4 Jumlah Masyarakat Mitra kalurahan Panularan P2MBG.....	10
Tabel 1.5 Kerangka Pemberdayaan Perempuan.....	47
Tabel 1.6 Contoh Profil dalam Program Pembangunan.....	48
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Surakarta.....	51
Tabel 2.2 Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota Surakarta Tahun 2009.....	52
Tabel 2.3 Penduduk dalam Kelompok Umur dan Kelamin tahun 2011.....	53
Tabel 2.4 Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 Tahun ke atas).....	54
Tabel 2.5 Penduduk Menurut pendidikan (Bagi 5 Tahun ke atas).....	54
Tabel 2.6 Jumlah Masyarakat Mitra Kalurahan Panularan Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).....	74
Tabel 2.7 Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Memasak.....	75
Tabel 2.8 Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Menjahit.....	76
Tabel 2.9 Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Tata Rias.....	77
Tabel 2.10 Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Bengkel.....	77
Tabel 3.1 Profil Gender dalam P2MBG di Kelurahan Panularan.....	146

DAFTAR MATRIK

Matrik 3.1 Keterlibatan Responden dalam Penentuan Lokasi.....	87
Matrik 3.2 Keterlibatan Responden dalam Seleksi Peserta.....	93
Matrik 3.3 Keterlibatan Peserta Perempuan dan laki-Laki dalam Sosialisasi.....	111
Matrik 3.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat di dalam Keseluruhan Kegiatan Perencanaan	114
Matrik 3.5 Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Memasak.....	120
Matrik 3.6 Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Menjahit.....	123
Matrik 3.7 Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan tata Rias.....	126
Matrik 3.8 Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Bengkel.....	128
Matrik 3.9 Bentuk Partisipasi Masyarakat di Dalam Pelaksanaan Program.....	130
Matrik 3.10 Bentuk Partisipasi Masyarakat di Dalam Proses Pemanfaatan.....	139
Matrik 3.11 Partisipasi Peserta P2MBG Kelurahan Panularan.....	140

Daftar Bagan

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	28
Bagan 1.2 Teknik Analisa Data.....	45



commit to user

ABSTRAK

YOHANES PANDHU INDRARKO, D0307016, “Partisipasi Masyarakat Panularan Terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG)”, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 167 halaman.

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan supaya tujuan dari program ini dapat terwujud. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial voluntaristik yang menempatkan aktor sebagai faktor penting, digunakan juga teknik analisis gender Longwe untuk menganalisa peran perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan P2MBG.

Penelitian ini mengambil lokasi di RW 8 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan saat P2MBG berlangsung. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik penarikan sampel menggunakan tehnik *snowball sampling*. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber data, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara garis besar bahwa P2MBG yang dilaksanakan di RW 8 Kelurahan Panularan, Kota Surakarta dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Terdapat berbagai bentuk Partisipasi masyarakat di dalam P2MBG tersebut seperti partisipasi langsung, tidak langsung dan spontan. Lewat P2MBG masyarakat di RW 8 Kelurahan Panularan diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri lewat pelatihan yang diselenggarakan dalam P2MBG. Peserta P2MBG Kelurahan Panularan yang merupakan masyarakat di RW 8 dapat meningkatkan kualitas hidup perekonomian keluarga lewat bantuan yang diberikan pemerintah kota. Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam P2MBG mengindikasikan munculnya paradigma pembangunan yang bersifat partisipatoris. Indikasinya dapat berupa ketrelibatan masyarakat setempat dalam perencanaan kegiatan yang meliputi pemilihan lokasi program, seleksi peserta, sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan kepada peserta berupa pelatihan memasak, menjahit, tata rias, bengkel serta pemberian bantuan dalam pemanfaatan program yang akan mengubah kualitas hidup keluarga mereka. Sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa partisipasi masyarakat setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai – nilai dan pengetahuannya itu dipertimbangkan secara penuh. Ditambah tidak adanya diskriminasi gender dalam setiap pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan ini

Kata Kunci : Partisipasi, P2MBG Kelurahan Panularan

ABSTRACT

YOHANES PANDHU INDRARKO, D0307016, “Panularan People’s Participation in the Gender-Oriented Society Empowerment Integrated Program (P2MBG)”, Thesis, Sociology Department, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 167 pages.

Gender-Oriented Society Empowerment Integrated Program (P2MBG) aims to improve the quality of family life toward the wellbeing, equality and justice through the cross-sectorial development activity in the attempt of coping with poverty focusing on the improvement of woman’s condition, status, position and participation. The people participation is very desirable in order to realize this program. The theory used in this research was a social voluntaristic action theory putting the actor as an important factor. Longwe’s gender analysis technique was also used to analyze the role of woman and man in the implementation of P2MBG.

This research was taken place in RW 8 of Kelurahan Panularan, Laweyan Subdistrict, Surakarta City. The objective of research is to find out how the participation is in every activity conducted during the P2MBG event. This study belongs to a descriptive qualitative analysis research type. The data used consisted of primary and secondary data with the technique of collecting data including observation, interview and documentation. The sampling technique used was snowball sampling one. In order to ensure the data validity, the data source triangulation was used, while the data analysis was done using an interactive analysis.

From the result of research, it can be concluded that overall, P2MBG implemented in RW 8 of Kelurahan Panularan, Laweyan Subdistrict, Surakarta City can be said as successful and running as planned. There is a variety of people participation forms in P2MBG including direct, indirect and spontaneous participation. Through the P2MBG, the people in 8 of Kelurahan Panularan, is expected to be able to develop their self-potential through the training held in P2MBG. The participant of P2MBG in Kelurahan Panularan consisting of the RW 8 community can improve their family’s economic life quality through the municipal government’s aid. The society empowerment strategy implemented in P2MBG indicates the emergence of development paradigm that is participatory in nature. The indication may include the involvement of local society in planning the activity encompassing the selection of program location, participant selection, socialization, and training implementation to the participants in the form of cooking, sewing, make-up, and workshop trainings as well as grant giving in utilizing the program that will change their family’s life. Thus, it can be ensured that the participation of local society, mindset and thinking pattern as well as their values and knowledge are taken completely into account. In addition, there is no gender discrimination in every implementation of P2MBG in Kelurahan Panularan.

Keywords: Participation, P2MBG of Kelurahan Panularan.

commit to user

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah partisipasi telah cukup lama dikenal khususnya di dalam pengkajian peranan anggota di dalam suatu organisasi, baik organisasi yang sifatnya tidak sukarela maupun yang sukarela. Istilah partisipasi sering diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial. Tidak dapat disangkal lagi bahwa partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan sangatlah penting dan bahkan menentukan. Adanya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan ini, sering dikaitkan dengan upaya menumbuhkan rasa memiliki ("*sense of ownership*" atau "*sense of belonging*") terhadap sarana atau prasarana yang dibangun. Dengan adanya rasa memiliki ini pada gilirannya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). (Rija Sudirja, 2007)

Partisipasi masyarakat yang baik adalah partisipasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Memfokuskan isu gender dengan memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, akan berpengaruh bukan saja terhadap kinerja suatu program, tetapi juga memberdayakan perempuan dan

menimbulkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap suatu sumber usaha. Selain itu, partisipasi ini dapat pula dipandang sebagai salah satu wujud dari demokratisasi dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Menurut James Midgley (1982) : "*By arguing that ordinary citizens have a right to share in decision making, proponents of community participation reveal the inspiration of democratic ideals*". Selain demokratisasi, partisipasi dapat disebutkan pula sebagai Hak Azasi Manusia. Apabila didudukkan di dalam kerangka berfikir Maslow, partisipasi dapat dipandang sebagai kebutuhan perwujudan diri. Lebih jauh dari itu, kalaulah masyarakat tidak diikuti sertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan ini, maka seringkali dijumpai adanya kasus-kasus dimana sarana atau prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan atau kehendak dan kondisi masyarakat setempat. (James Midgley, 1986)

Adanya konsep pembagaian kerja dan tanggung jawab atas gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada pekerjaan-pekerjaan reproduktif atau pekerjaan rumah lainnya. Dengan kemajuan peradaban pembangunan masyarakat yang semakin pesat, bahwa setiap makhluk di bumi ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran yang sangat penting di dalam meningkatkan harkat dan martabatnya tanpa harus membedakan jenis kelamin. Akses yang lebih baik terhadap sumberdaya juga memberikan kesempatan kepada perempuan sehingga perempuan bisa berkontribusi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat, penafsiran agama dan konstruksi sosial budaya yang mengatur alokasi peranan, atribut, stereotip, hak, kewajiban, tanggung jawab dan persepsi terhadap laki-laki maupun perempuan. Marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi terhadap kaum perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat lemah. Hal ini menyebabkan kondisi perempuan makin memprihatinkan. Angka harapan hidup perempuan meskipun lebih tinggi dari laki-laki tapi angka kematian ibu hamil melahirkan masih tinggi. Kombinasi kendala ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kuasa yang dihadapi oleh perempuan (miskin) menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan perempuan. Kemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi rendah, termasuk tidak adanya peluang ekonomi dan otonomi, kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi (termasuk kredit, pemilikan lahan dan pewarisan), kurangnya akses ke pendidikan dan jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka dalam penentuan keputusan.

Terlintas sekilas image tentang perbedaan Gender bahwa perempuan menjadi obyek yang sangat dirugikan oleh kesempatan dan peluang-peluang dalam berpartisipasi khususnya dalam rangka usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang menyandang kemiskinan berhubungan langsung dengan adanya ketidakmandirian dan sempitnya peluang-peluang ekonomi, kurangnya akses pada sumber daya-

sumber daya ekonomi termasuk kredit, pemilikan dan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kurangnya akses pada pendidikan formal, pelayanan kesehatan dan pelayanan-pelayanan pendukung lainnya, maupun partisipasi minimal dalam proses pengambilan keputusan.

Tabel 1.1
Banyaknya Penduduk Usia Sekolah menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2009

Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
07-12	Tidak/Belum Sekolah	243	-	243
	Masih Sekolah	25.522	23.319	48.841
	Tidak Sekolah Lagi	-	-	-
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun		25.765	23.319	49.084
13-15	Tidak/Belum Sekolah	243	-	243
	Masih Sekolah	10.448	12.387	22.835
	Tidak Sekolah Lagi	972	243	1.215
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun		11.663	12.630	24.293
16-18	Tidak/Belum Sekolah	-	-	-
	Masih Sekolah	7.774	13.852	21.626
	Tidak Sekolah Lagi	2.674	3.159	5.833
Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun		10.448	17.011	27.459
19-24	Tidak/Belum Sekolah	243	-	243
	Masih Sekolah	8.505	8.990	17.495
	Tidak Sekolah Lagi	23.082	23.087	46.169
Jumlah Penduduk Usia 19-24 tahun		31.830	32.077	63.907

Sumber : BPS Kota Surakarta

Tabel 1.2
Banyaknya tenaga Kerja Produksi dan Lainnya Menurut Kelompok Industri dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun Survei 2009

No	Kelompok Industri	Tenaga Produksi			Tenaga Lainnya		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Makanan	500	127	627	394	2	496

	dan Minuman						
16	Pengolahan tembakau	622	185	807	473	29	502
17	Tekstil	1.801	278	2.079	2.257	254	2.511
18	Pakaian jadi	816	462	1.278	1.795	421	2.216
19	Kulit	123	30	153	127	21	148
20	Kayu, anyaman	20	0	20	0	7	7
21	Kertas, barang dari kertas	43	13	56	36	14	50
22	Penerbitan, percetakan dan media rekaman	1.083	378	1.461	700	148	848
24	Kimia, barang dari kimia	109	18	127	129	29	158
25	Karet dan barang dari karet	973	102	1.057	881	90	971
28	Barang dari logam dan perlengkapannya	48	4	52	1	4	5
29	Mesin dan perlengkapannya	133	14	147	0	10	10
32	Radio, televisi, komunikasi	4	11	15	3	8	11
33	Peralatan kedokteran	58	5	63	0	2	2
36	Furniture	380	53	433	212	45	257
	Jumlah	6.713	1.680	8.393	7.008	1.184	8.192

Sumber : BPS Kota Surakarta

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa kondisi perempuan di Kota Surakarta masih banyak memerlukan perhatian. Di bidang pendidikan perempuan memang sudah banyak yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sementara bahan ajar yang digunakan serta proses pengelolaan pendidikan masih bias gender, sebagai akibat dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan pendidikan. Sebagai contoh banyak sekali kalimat di buku ajar siswa yang terdapat kalimat seperti Bapak

pergi ke kantor, sementara ibu ke pasar. Di bidang ekonomi kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah. Demikian pula halnya akses terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi pasar, kredit, dan modal kerja. Tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Besarnya upah yang diterima perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima sekitar 50% sampai 80 % upah yang diterima laki-laki. Selain itu banyak perempuan bekerja pada pekerjaan marginal sebagai buruh lepas, atau pekerja keluarga tanpa memperoleh upah atau dengan upah rendah. Mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan kena dampak.

Di bidang pengambilan keputusan dan politik perempuan hanya diwakili oleh 8,8% dari seluruh jumlah anggota DPR. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Agung hanya 13%. Jumlah PNS perempuan 36,9%, dan dari jumlah tersebut hanya 15% yang menduduki jabatan struktural. Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa peran perempuan sebagai pengambil kebijakan relatif kecil dibanding peran laki-laki. (Endang Hastuti L, 2004). Banyaknya pegawai negeri sipil di Kota Surakarta menurut BPS Kota Surakarta tahun 2009 juga menunjukkan laki-laki masih unggul dengan 5.361 orang dibandingkan dengan kaum perempuan yang 5.036. Dengan

jumlah penduduk Surakarta pada tahun 2009 yang menempatkan perempuan sebagai penduduk terbanyak (278.915 jiwa) dibanding laki-laki (249.287 jiwa), seharusnya perempuan mendapatkan kesetaraan gender di berbagai bidang.

Dalam konteks aset sebuah pembangunan masyarakat, perempuan merupakan investasi yang sangat produktif karena perempuan merupakan penduduk terbesar di negeri ini dan itu sebuah sumber potensi yang mampu diperdayakan dengan pemberian bekal pengetahuan dan ketrampilan yang kompetitif. Melalui pembangunan masyarakat berbasis kesetaraan Gender akan sangat mendorong akses-akses ekonomi yang sangat berpeluang terhadap baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 1.3
Indek Pembangunan Manusia, Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2004 - 2007

P Kabupaten/Kota	HDI			GDI			GEM		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
()	(3)	(4)		(6)	(7)	(19)	(9)	(10)	(11)
33. Jawa Tengah	69,8	70,3	70,92	60,8	63,7	64,3	56,9	59,3	59,7
72. Kota Surakarta	76,0	76,4	76,58	71,9	74,1	74,8	56,4	59,2	59,4

Sumber Data : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama BPS dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Tugas utama negara mulai dari lingkup nasional, propinsi dan kabupaten adalah menyelenggarakan pembangunan, berhasil tidaknya tugas utama negara ini harus dapat diukur untuk dapat melihat sejauhmana

penyelenggaraan pembangunan tersebut berdampak pada kesejahteraan manusia, salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan adalah HDI yaitu singkatan dari Human Development Index atau dalam bahasa Indonesia Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini terdiri dari : Indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), Indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah) dan Indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Walaupun lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, namun kondisi ketertinggalan perempuan dapat menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia (Soemartoyo, 2002). Hal ini dapat dilihat dari *Gender-related Development Index (GDI)* yang berada pada peringkat 90 pada tahun 1998 dari 174 negara dan menurun menjadi 92 dari 146 negara pada tahun 1999. Kesetaraan gender yang lebih baik di Indonesia telah berperan dalam peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di negara ini seperti tercermin dalam *Gender-related Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. Human Development Report (HDR) tahun 2007-2009 menempatkan GDI Indonesia pada 0,721 atau sedikit meningkat dari 0,704 di tahun 2006. Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dinyatakan secara tegas dalam berbagai macam regulasi, meski demikian berbagai permasalahan gender masih terjadi. Indikator makro pembangunan gender Indonesia berupa *Gender-related Development Index* tahun 2008 sebesar 66,38 dan *Gender Empowerment*
commit to user

Measures (GEM) sebesar 62,27. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dari 155 negara, GDI dan GEM Indonesia masih lebih rendah dan berada di peringkat ke-90. Angka tersebut menunjukkan adanya akses perempuan yang lebih baik dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dari tabel di atas juga menunjukkan jika ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Jawa Tengah dan di Kota Surakarta sudah menurun, ditunjukkan dengan semakin naiknya angka Gender related Development Index.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peran perempuan untuk berpartisipasi adalah melalui Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG). Di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berspektif Gender (P2MBG) telah dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2010. P2MBG yang berlangsung di Kelurahan Panularan adalah pemberian ketrampilan pada masyarakat mitra Kelurahan Panularan. Pelatihan ketrampilan itu meliputi ketrampilan menjahit, tata rias, memasak dan perbengkelan. Pelatihan ketrampilan inilah yang nanti dijadikan bekal untuk melakukan suatu usaha. Maka peneliti ingin meneliti tentang P2MBG yang sudah diluncurkan di Kelurahan Panularan.

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) di Kota Surakarta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga masyarakat mitra menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan perempuan. Tidak hanya hasil ekonomi saja yang diharapkan dari P2MBG, tetapi juga peran dan partisipasi perempuan yang ingin lebih ditonjolkan supaya tidak adanya anggapan bahwa perempuan masih kalah dengan kaum lelaki dalam berbagai bidang.

Tabel 1.4
Jumlah Masyarakat Mitra Kalurahan Panularan
Program pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender
(P2MBG)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	26
2	Perempuan	74
Jumlah		100

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Dari tabel di atas bisa diperoleh bahwa partisipasi perempuan lebih besar dalam mendaftar kegiatan P2MBG, 74% dari total 100 peserta yang mendaftar kegiatan P2MBG adalah perempuan. Akan tetapi hal tersebut belum bisa dikatakan P2MBG sudah berhasil memacu perempuan dalam berpartisipasi secara keseluruhan. Belum tentu dari 74 orang tersebut bisa selalu aktif dalam setiap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Bapermas PP, PA dan KB selaku penyelenggara. Baik saat perencanaan kegiatan,

pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan kegiatan. Melalui P2MBG ini maka akan bertemu dengan konsep pemberdayaan di dalam konteks kesetaraan gender. Pada prinsipnya, untuk membangun kesetaraan relasi antara laki – laki dan perempuan.

Peneliti memilih judul “*Bentuk Partisipasi Masyarakat Warga Panularan terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga*”. Peneliti memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui partisipasi warga Kelurahan Panularan dalam mengikuti seluruh kegiatan dalam P2MBG, baik dalam perencanaan P2MBG, pelaksanaan P2MBG maupun pemanfaatan P2MBG. Partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam P2MBG ini seharusnya sangat kentara dan program ini bisa mengurangi ketidakadilan gender di dalam partisipasi perempuan di sebuah program.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini sehingga mempermudah proses pengambilan data dan pelaporan hasil penelitian. Oleh karena itu pada penelitian ini pun dibuat rumusan masalah, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat warga Kelurahan Panularan Kota Surakarta dalam mengikuti Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat warga Kelurahan Panularan Kota Surakarta dalam mengikuti Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif yang Gender (P2MBG).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat warga Kelurahan Panularan Kota Surakarta dalam mengikuti Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan serta memperluas khasanah ilmu terutama kajian-kajian sosiologis yang berhubungan dengan partisipasi perempuan warga Kota Surakarta dalam mengikuti Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).

E. Tinjauan Pustaka

1. Batasan konsep

1.1 Partisipasi

Dalam pembangunan kita kenal pendekatan dari atas (*top down strategy*) dan dari bawah (*bottom up strategy*) dengan melihat kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan tersebut, maka dalam program pengembangan masyarakat, pendekatan dari bawah (dilengkapi dengan bimbingan dari atas), merupakan alternatif yang layak digunakan. Dengan pendekatan tersebut, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bahkan mutlak diperlukan. Karena pendekatan tersebut bertumpu pada kekuatan masyarakat untuk secara aktif berperan serta (ikut serta) dalam proses pembangunan secara menyeluruh. Partisipasi saja sebagai strategi dalam program pengembangan masyarakat, tetapi ia juga menjadi hasil yang sangat diharapkan dari pada program pengembangan masyarakat. Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Partisipasi dalam banyak hal dapat diartikan sebagai hal yang sesuai dengan keperluannya. Partisipasi di sini mempunyai arti keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap fase kegiatan mulai dari perencanaan

dan pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi dan pemanfaatan atas inisiatif sendiri berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai hambatan dan merupakan bentuk inovatif dalam melihat peluang atas kebutuhan-kebutuhannya. (Jobes, 1997)

Metode “*Participatory Rural Appraisal (PRA)*” kini sudah sangat populer di Indonesia. Berbagai penelitian dan pengembangan masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah, telah memasukkan metode ini dalam program-program mereka. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* memang telah terbukti sangat efektif dalam melibatkan masyarakat dalam semua tahapan program: dari identifikasi masalah hingga perencanaan, dari pengorganisasian dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Selain alasan “ideologis” karena kesesuaian dengan asas-asas “musyawarah untuk mufakat”, “gotong-royong”, “pemberdayaan masyarakat”, kecewa terhadap pendekatan “*topdown*” yang banyak digunakan selama ini dalam banyak hal juga ikut mendongkrak popularitas PRA (Moeljarto, 1999 dalam penelitian Rija Sudirja,2007).

Partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah lokal. Berkaitan dengan berbagai bentuk
commit to user

kegiatan berpartisipasi, maka kegiatan partisipasi dibagi menjadi empat bagian :

- a. Partisipasi masyarakat dalam sebuah forum, sehingga masyarakat, khususnya petani dapat turut serta dalam pengambilan keputusan tentang pengambilan-pengambilan keputusan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu menumbuhkan tentang program-program pertanian yang akan dilaksanakan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan yang bertujuan agar masyarakat juga turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program.
- c. Partisipasi dalam pemantauan atau evaluasi, yang berguna untuk mengetahui tujuan yang tercapai juga unyuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala-kendala yang muncul selama kegiatan dilaksanakan. Dalam hal ini partisipasi untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan sangat diperlukan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil merupakan hal yang penting yang diharapkan dapat memperbaiki mutu hidup mayarakat banyak sehingga pemerataan hasil dari kegiatan merupakan tujuan utama (Mardikanto, 1989).

Partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah lokal (setempat) (Mardikanto, 1989). Slamet (1993) menambahkan untuk tingkatan pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat didalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan didalam kegiatan-kegiatan fisik.

Secara harafiah, partisipasi berarti “turut serta dalam suatu kegiatan”. “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”, “peran serta aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan”. Partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai “bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan”.

Dusseldorp mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada 9 dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan derajat kesukarelaan

- a. Partisipasi Bebas

Terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu.

commit to user

Partisipatif bebas dapat di bedakan menjadi :

a.1 Partisipasi spontan

Terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan-ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

a.2 Partisipasi terbujuk

Bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu.

b. Partisipasi terpaksa

b.1 Partisipasi terpaksa oleh hukum

b.2 Partisipasi terpaksa karena keadaan kondisi sosial ekonomi

2. Berdasarkan cara keterlibatan

a. Partisipasi langsung

Terjadi bila diri orang itu melaksanakan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi seperti misalnya mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan, turut diskusi.

b. Partisipasi tidak langsung

Terjadi apabila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya pemelihan wakil-wakil di dalam

commit to user

DPR.

3. Berdasarkan tingkatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana

a. Partisipasi lengkap

Bila seorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana.

b. Partisipasi sebagian

Bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu.

4. Berdasarkan tingkat organisasi

a. Partisipasi yang terorganisasi

Terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan.

b. Partisipasi yang tidak terorganisasi

Terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang hukumnya karena keadaan yang gawat, misalnya sewaktu terjadi kebakaran.

5. Berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan

a. Partisipasi intensif

Terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas kegiatan partisipasi yang tinggi. Menurut Muller hal ini di ukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi

commit to user

b. Partisipasi ekstensif

Terjadi apabila pertemuan terjadi secara tidak teratur dan kegiatan atau kejadian-kejadian yang membutuhkan partisipasi interval waktu yang panjang.

6. Berdasarkan lingkup liputan kegiatan

a. Partisipasi tak terbatas

Yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu dapat diawali oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas tertentu.

b. Partisipasi terbatas

Terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administratif dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipatif.

7. Berdasarkan efektifitas

a. Partisipasi efektif

Yaitu kegiatan partisipatif yang telah memunculkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi.

b. Partisipasi tidak efektif

Terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan- tujuan aktivitas yang dicanangkan terwujudnya.

8. Berdasarkan siapa yang terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Anggota masyarakat setempat : penduduk setempat, pemimpin setempat.
- b. Pegawai pemetintah : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk.
- c. Orang-orang luar : penduduk dalam masyarakat, bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

Anggota-anggota dari berbagai kategori dapat diorganisir (partisipasi bujukan) atau dapat mengorganisir diri mereka berdasarkan dua prinsip, yaitu,

- i. Perwilayahan, sifatnya homogen sejauh masih menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.
- ii. Kelompok-kelompok sasaran, sifatnya homogen, sejauh menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Berdasarkan gaya partisipasi

Rothman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat di dalam setiap model terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

a. Pembangunan lokalitas

Model praktek organisasi ini sama dengan *commit to user*

masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dan dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri. Model ini mencoba melibatkan seluruh anggota masyarakat serta mempunyai fungsi integratif.

b. Perencanaan sosial

Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya. Tujuan utama melibatkan orang-orang adalah untuk mencocokkan sebesar mungkin terhadap kebutuhan yang dirasakan dan membuat program lebih efektif. Partisipasi di dalam perencanaan sosial dapat dicirikan seperti disebutkan oleh Arstein sebagai informan atau placatiaon. Akan tetapi adalah juga bahwa partisipasi berkembang ke dalam bentuk partnership atau perwakilan kekuasaan.

c. Aksi sosial

Tujuan utama dari tipe partisipasi ini adalah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber- sumber perhatian utama ada satu bagian dari masyarakat yang kurang beruntung. Seperti halnya dalam pembangunan lokalitas, peningkatan

commit to user

partisipasi diantaranya kelompok sasaran adalah salah satu dari maksud-maksud yang penting (*Slamet, 1993:10-21*).

Dari uraian tersebut dapat tarik suatu pengertian bahwa partisipasi yang sering juga disebut peran serta atau ikut serta masyarakat, diartikan sebagai adanya motivasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif (dan terorganisasikan) dalam seluruh tahapan pembangunan, sejak tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi hingga pengembangan atau perluasannya.

Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana dilihat dengan adanya kesukarelaan anggota untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan tanpa mengesampingkan perbedaan gender. Selain itu Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah partisipasi dalam pembangunan Totok Mardikanto (dalam Yowono 2006), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya kesukarelaan anggota untuk terlibat dan atau melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, Glenn A. Bowen: *Community Development Journal* Vol 43 No. 1 January 2008 pp.65 & Oxford University Press and *Community Development Journal*. 2007), mengemukakan bahwa :

“citizen participation has long been regarded as the hall mark of a democratic society community development practitioners are among the strongest proponents citizen participation as an integral element of economic

improvement and social change efforts over the years, there has been and an ebb and flow of interest among social science scholars regarding citizen participation in planning and decision making processes. Recently however researchers have shown renewed interest in participatory processes and out comes involving citizens at the local community level (Naparstek and Dooley, 1997, people and Colby, 2002, Schafft and Green Wood 2003, Silverman, 2005)”(dalam Glenn A.Bowen; “Community Development Journal”Vol 43 No 1 January 2008 pp 65 & Oxford Uni versity Press and Community Development Journal. 2007).

Journal.Permissions@Oxfordjournals.org;doi:10.1093/cdj/bm.011.Advance Access Publication 26 April 2007.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

1.2 P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender)

Program Terpadu pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender berawal dari salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan Kemiskinan sangat berpengaruh pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan pada rumah tangga. Adanya konsep pembagaian kerja dan tanggung jawab atas gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada pekerjaan-pekerjaan reproduktif atau pekerjaan rumah lainnya.

Dengan kemajuan peradaban pembangunan masyarakat yang semakin pesat, bahwa setiap makhluk di bumi ini baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran yang sangat penting di dalam meningkatkan harkat dan martabatnya tanpa harus membedakan jenis kelamin.

Terlintas sekilas image tentang perbedaan Gender bahwa perempuan menjadi obyek yang sangat dirugikan oleh kesempatan dan peluang-peluang dalam berpartisipasi khususnya dalam rangka usaha ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang menyandang kemiskinan berhubungan langsung dengan adanya ketidak mandirian dan sempitnya peluang-peluang ekonomi, kurangnya akses pada sumber daya-sumber daya ekonomi termasuk kredit, pemilikan dan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kurangnya akses pada pendidikan formal, pelayanan kesehatan dan pelayanan-pelayanan pendukung lainnya, maupun partisipasi minimal dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kemiskinan juga dapat memaksa perempuan masuk dalam situasi buruk yang membuat mereka rawan terhadap eksploitasi seksual, terutama bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan.

Dalam konteks aset sebuah pembangunan masyarakat, perempuan merupakan investasi yang sangat produktif karena perempuan merupakan penduduk terbesar di negeri ini dan itu

sebuah sumber potensi yang mampu diperdayakan dengan pemberian bekal pengetahuan dan ketrampilan yang kompetitif.

Melalui pembangunan masyarakat berbasis kesetaraan Gender akan sangat mendorong akses-akses ekonomi yang sangat berpeluang terhadap baik laki-laki maupun perempuan. Maka salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan dan keluarganya adalah melalui Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperspektif Gender.

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) di Kota Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan. (Buku Pedoman P2MBG Kota Surakarta, 2010)

2. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang partisipasi masyarakat sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian berjudul Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Rumah Dome Sebagai Tujuan Wisata. Juga penelitian berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Perkotaan. Berikut adalah hasil penelitian tentang partisipasi perempuan :

- a. Penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Rumah Dome Sebagai Daerah Tujuan Wisata” yang disusun oleh Ficka Aprista Nuaniti. Penelitian yang dilakukan di daerah Nglepen, Kelurahan Sumberhajo, Kecamatan Prambanan, Yogyakarta ini dapat mengungkapkan bahwa partisipasi dalam perencanaan masyarakat Dusun Nglepen dalam pembangunan ditunjukkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam pelaksanaan masyarakat ditunjukkan dengan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, pemikiran maupun waktu. Partisipasi dalam pemanfaatan masyarakat Dusun Nglepen sebagai daerah tujuan wisata adalah dengan mendirikan usaha bordir, warung makan, warung kelontong serta jasa pemandu wisata.
- b. Penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan” yang disusun oleh Tiwuk Adinala Dwi Andari dengan lokasi penelitian di Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Hasil yang

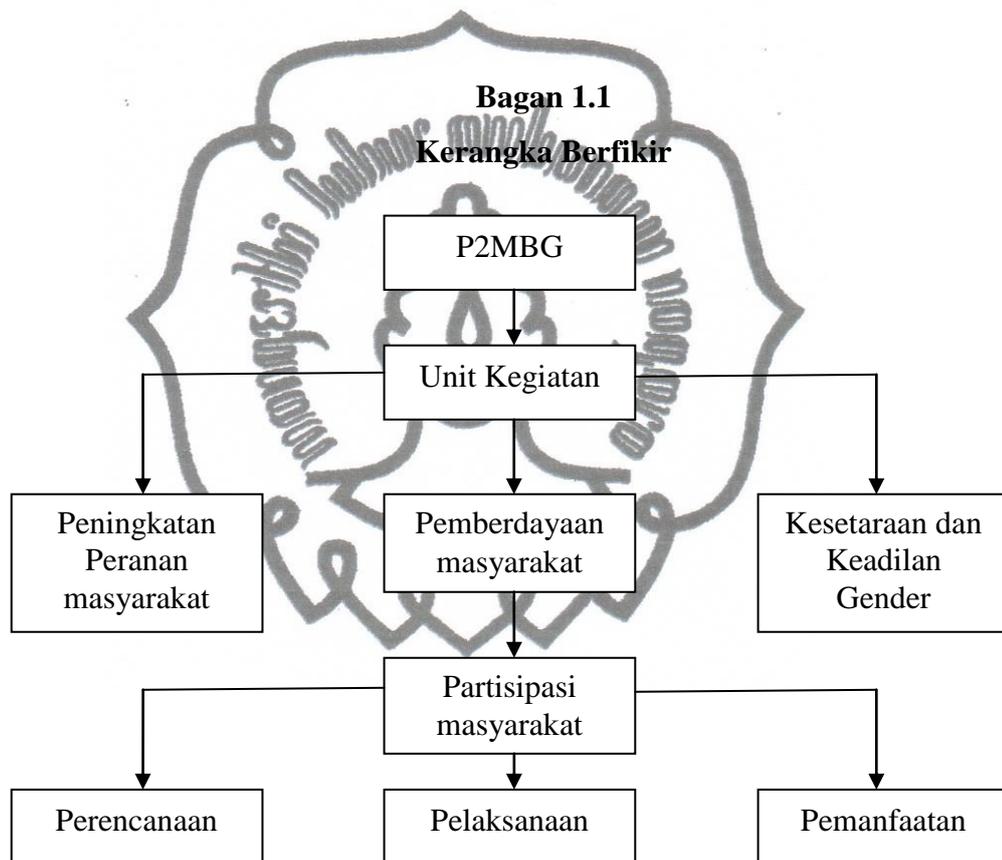
didapatkan dari penelitian itu adalah secara garis besar bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Sawahan Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Partisipasi masyarakat dalam proyek PNPM Mandiri Perkotaan tersebut dapat dikatakan cukup baik. Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam proyek PNPM Mandiri Perkotaan mengindikasikan munculnya paradigma pembangunan yang bersifat partisipatoris. Indikasi tersebut ada dua perspektif yaitu yang pertama. Pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan sosialisasi, pelaksanaan dan pelestarian program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka. Sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa partisipasi masyarakat setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai – nilai dan pengetahuannya itu dipertimbangkan secara penuh. Yang kedua adalah membuat umpan balik (feed back) yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terlepas dari kegiatan pembangunan.

Dari penelitian di atas penelitian tentang partisipasi masyarakat terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) belum pernah diteliti. Lewat penelitian partisipasi masyarakat di atas bisa menjadi acuan dalam penelitian

commit to user

penulis yang berjudul “Bentuk Partisipasi Masyarakat Warga Panularan terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga”.

3. Kerangka berpikir



Secara khusus melalui Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) pemerintah Kota Surakarta salah satunya ingin meningkatkan kualitas hidup keluarga. Meningkatkan kondisi, status, kedudukan perempuan dan meningkatkan akses pada pendidikan.

Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi. Dapat dilihat dari sejauh mana mereka berpartisipasi dalam program tersebut. Penelitian ini melihat bagaimana partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam P2MBG, khususnya dalam kegiatan unit ekonomi sesuai dengan tahapan-tahapan perencanaan program, pelaksanaan program dan pemanfaatan hasil program dan yang lebih utama partisipasi masyarakat dalam P2MBG ini adalah fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan perempuan di dalam suatu program.

F. Landasan Teori

1. Teori tindakan Sosial Voluntaristik

Talcott parsons mengembangkan teori tindakan sosialnya dengan suatu analisa kritis yang sangat intensif terhadap para ahli teori sosial Eropa abad ke-19 yakni Alfred Marshall, Vilfredo pareto, Emile Durkheim dan Max Webber. Inti argumennya adalah bahwa keempat ahli teori ini akhirnya sampai pada suatu titik temu dengan elemen-elemen dasar untuk suatu teori tindakan sosial yang bersifat voluntaristik, walaupun mereka berbeda dalam titik tolaknya. Parsons menganggap ini sebagai sumbangannya karena mengidentifikasi elemen-elemen yang penting itu dan mengintegrasikannya dalam suatu perspektif teoritis yang lebih umum.

Dalam analisisnya, Parsons banyak menggunakan kerangka alat-tujuan (*means-ends framework*). Inti pemikiran parsons adalah bahwa :
commit to user

1. Tindakan itu diarahkan pada tujuannya (atau memiliki suatu tujuan).
2. Tindakan terjadi dalam suatu situasi, di mana beberapa elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat menuju tujuan itu.
3. Secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penentuan alat dan tujuan.

Singkatnya, tindakan itu dilihat sebagai satuan kenyataan sosial yang paling kecil dan paling fundamental. Komponen-komponen dasar dari satuan tindakan adalah tujuan, alat, kondisi dan norma. Alat dan kondisi berbeda dalam hal di mana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan, kondisi merupakan aspek situasi yang tidak dapat dikontrol oleh orang yang bertindak itu.

Ide-ide mengenai hakikat tindakan sosial sesuai dengan pikiran sehat dan pengalaman setiap hari. Pasti banyak orang mengenal tindakannya sendiri sebagai mempunyai tujuan yang diatur secara normatif dan banyak pula yang mengakui bahwa situasi di mana tindakan itu terjadi juga penting. Pentingnya analisa Parsons tidak terletak pada kaitannya dengan pikiran sehat atau pengalaman setiap hari, melainkan dalam kenyataan bahwa analisa itu merupakan suatu jembatan penghubung posisi-posisi yang salaing bertentangan dan berat sebelah.

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai

commit to user

tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parson sebagai *voluntarism*. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. (Doyle Paul Johnson, 1986)

Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi yang penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif. (Ritzer, 2002; 48-49)

Dalam penelitian ini yang menjadi aktor dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender adalah peserta P2MBG dan ketua kelompok dari warga Kelurahan Panularan yang sebelumnya telah ditunjuk dan Bapermas Kota Surakarta bidang pemberdayaan perempuan. Kedua aktor P2MBG tersebut mempunyai peran sebagai agen pembawa perubahan (*Agent of Change*) sampai tercapainya tujuan peserta P2MBG di Kelurahan Panularan menjadi lebih berdaya. Peran yang harus diperankan oleh aktor P2MBG antara lain : peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasional, peran teknis,

commit to user

dimana masing-masing peran tersebut harus mampu diimplementasikan oleh fasilitator dalam usaha untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta P2MBG di Kelurahan Panularan, sehingga tujuan dari Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender bisa tercapai.

2. Kerangka kerja Longwe

a. Pengertian

Teknik Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan kriteria pembangunan perempuan (*Women's Empowerment Criteria* atau *Women's Development Criteria*), adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol (Widaningroem,1998). Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis semakin tinggi tinggi tingkat pemberdayaan.

- Dimensi Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender di tingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok untuk masing-masing kebutuhan dasarnya.

- Dimensi Akses

Kesenjangan gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Pembangunan perempuan tidak cukup hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja merupakan isu gender tetapi juga akibat diskriminasi gender.

- Dimensi kesadaran Kritis

Kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional

adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang, di atas : bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan kearah kesetaraan.

- Dimensi Partisipatif

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi perempuan dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kuantitatif (berapa laki-laki dan perempuan yang terlibat) dan kualitatif (menunjuk peranan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan/ penetapan keputusan). Hasil analisis partisipasi ditunjukkan dalam tabel profil partisipasi. Ketidaksetaraan peranan laki-laki dan perempuan dapat

dilihat dari hasil tersebut. Namun secara umum partisipasi dapat dilihat dari adanya peran serta antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang lebih besar.

- **Dimensi Kuasa/ Kontrol**

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kestaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya.

b. Kegunaan

Teknik analisis Longwe digunakan sebagai alat analisis, yaitu menganalisis proses pemampuan perempuan, bukan dalam arti kesejahteraan materiil. Tujuannya adalah untuk memahami lima butir kriteria analisis (kesejahteraan, akses, *commit to user*

penyadaran, akses, partisipasi aktif dan penguasaan) sehingga dapat menginterpretasikan pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang penting dan bagian integral dari proses pembangunan serta untuk mencapai pemerataan gender dalam lima butir tersebut. Metode ini dapat digunakan pada setiap tahap dari siklus proyek yaitu dilihat pada bagian yang dirasa sangat penting, melihat kebutuhan dan isu perempuan dalam implementasi proyek, evaluasi dan program pembangunan, melihat derajat sensitivitas terhadap isu perempuan yaitu dengan menilai negatif, netral atau positif. Negatif berarti tujuan proyek tanpa mengkaitkan isu perempuan, netral berarti isu perempuan sudah dilihat tetapi tidak diangkat dan ditangani, dan intervensi proyek tidak berakibat lebih buruk pada perempuan dan positif berarti tujuan proyek betul-betul positif, memperhatikan isu perempuan dan menanganinya sehingga hasilnya meningkatkan kedudukan perempuan relatif terhadap laki-laki. (Trisakti, Handayani. 2008)

G. Definisi Konseptual

1. Partisipasi

Partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam usaha untuk mencapai tujuan dengan cara merencanakan, melaksanakan, *commit to user*

menggunakan dan disertai tanggung jawab. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah masyarakat peserta P2MBG baik peserta perempuan maupun peserta laki-laki, sebagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) baik dalam pra kegiatan, saat berlangsung kegiatan dan pasca program berlangsung.

2. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)

Program yang dilakukan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami perempuan dan keluarganya. Program ini bertujuan mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia melalui peningkatan kedudukan, peran, kemampuan dan ketahanan mental dan spiritual perempuan dengan pendekatan lintas sektoral.

3. Teknik analisis gender

Analisis gender merupakan proses menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi dan peran serta tanggungjawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Analisis gender ini secara rinci ingin mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, mengidentifikasi kesenjangan gender, peran, akses, control dan manfaat, menghimpun masalah-masalah

kesenjangan gender dan upaya pemecahannya dan mengidentifikasi langkah-langkah intervensi yang diperlukan (Prahastiwi Utari, 2008:14-15)

4. Perspektif Gender

Perspektif gender mempergunakan aspek gender untuk membahas atau menganalisis isu-isu di dalam bidang-bidang: politik, ekonomi, sosial, hukum budaya, psikologi untuk memahami bagaimana aspek gender tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, program, proyek, dan kegiatan-kegiatan. Dalam pembahasan tersebut dipelajari bagaimana faktor gender menumbuhkan diskriminasi dan menjadi perintang bagi kesempatan dan pengembangan diri seseorang. Menurut perspektif gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika di dalam keluarga tersebut membangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, menghargai dan bantu membantu di berbagai sektor.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan warga Kelurahan Panularan yang terjadi saat diselenggarakannya P2MBG oleh Pemerintah Surakarta di Kelurahan Panularan . Penggunaan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian

ini mampu mengungkap berbagai informasi kualitatif yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah atau frekuensi dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “Proses” daripada “Hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 2002).

Sedang deskriptif kualitatif sendiri dilakukan dengan mendiskripsikan suatu gejala yang menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian. (Y. Slamet, 2006:7-8)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Di Kelurahan Panularan sudah diselenggarakan P2MBG. Kegiatan pelatihan P2MBG sendiri diadakan pada tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan 8 Oktober 2010 di rumah salah satu warga (Kediaman Bapak RW 8) Kelurahan Panularan.
- Peserta pelatihan P2MBG di kelurahan Panularan diikuti oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan, sehingga menjadikannya lebih menarik untuk dikaji.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua macam jenis data yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang diberikan oleh informan. Mereka yang diwawancarai untuk mencari informasi tentang partisipasi masyarakat warga Panularan terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG), sumber data penelitian ini diperoleh berasal dari para peserta P2MBG di Kelurahan Panularan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data ini berasal dari buku pedoman P2MBG, buku-buku, arsip serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat non verbal. Sekalipun dasar utama daripada metode observasi adalah penggunaan indera visual dan indera yang lain (Y. Slamet, 2006:85).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe observasi tidak berpartisipasi, peneliti tidak berperan ganda, peneliti berperan sebagai pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik percakapan dengan informan, dengan maksud mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moeloeng, 2002:135) dalam hal ini peneliti lebih dulu meminta ijin kepada informan demi kelancaran penelitian ini. Pelaksanaan wawancara di lapangan peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada pelaksanaannya daftar pertanyaan di lapangan bisa berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara mendalam (In Dept Interview) untuk lebih menggali data yang lebih banyak dari Informan.

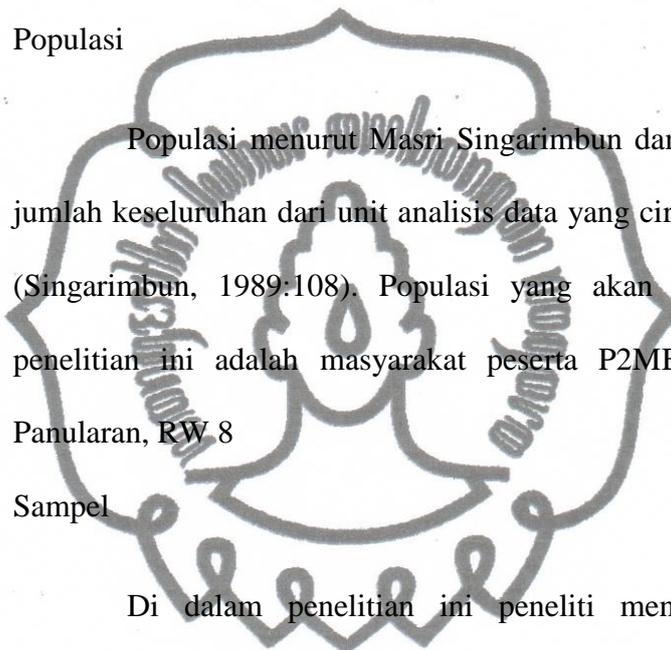
c. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian akan menggunakan alat bantu yang berupa kamera. Kamera yang ada digunakan untuk mengambil gambar yang ada di lapangan. Gambar yang diambil dapat digunakan sebagai dokumentasi dalam penelitian ini. Adapun gambar yang

relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain kamera penulis juga menggunakan tape recorder yang digunakan untuk merekam semua isi wawancara agar tidak terjadi kehilangan data pada saat wawancara.

5. Teknik pengambilan Sampel

a. Populasi



Populasi menurut Masri Singarimbun dan Sofian E adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis data yang cirinya dapat diduga (Singarimbun, 1989:108). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat peserta P2MBG di Kelurahan Panularan, RW 8

b. Sampel

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *Snowball Sampling*, *Snowball Sampling* ialah penarikan sampel bertahap yang makin lama jumlah respondennya semakin bertambah besar. Penarikan sampel dengan *snowball* dapat diibaratkan dengan sebuah bola salju yang semula adalah kecil berkembang menjadi membesar seraya dia menggelinding dari bukit. *Snowball Sampling* (Yin, 1987 di dalam Slamet, 2006 : 63) digunakan bilamana peneliti ingin mengumpulkan data yang berupa informasi dari informan dalam salah satu lokasi, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih, karena tidak mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat secara pasti. Untuk itu peneliti bisa

secara langsung memasuki lokasi dan bertanya mengenai informasi yang diperlukannya kepada siapapun yang dijumpai pertama, Di sini peneliti kemungkinan hanya akan mendapatkan informasi yang sangat terbatas. Namun ia boleh bertanya pada informan pertama tersebut barangkali ia mengetahui siapa informasinya yang bisa ia temui. Demikian seterusnya, peneliti berjalan tanpa rencana, semakin lama semakin mendekati informan yang paling mengetahui informasinya, sehingga peneliti bisa menemui informan berikutnya dan bertanya lebih jauh dan mendalam (Sutopo, 2002 : 57).

Dalam Penelitian ini peneliti mengambil Sample 1 (satu) orang Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bapermas Kota Surakarta selaku penyelenggara P2MBG sebagai informan, kemudian berkembang ke 1 (satu) orang ketua kelompok sebagai informan dan 9 (sembilan) peserta P2MBG Kelurahan Panularan sebagai responden, jadi total sample yang peneliti peroleh adalah 11 orang yaitu 2 (dua) orang sebagai Informan dan 9 orang sebagai responden.

6. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode, *commit to user*

peneliti dan teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal tersebut akan dicapai dengan jalan:

- i. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- ii. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- iii. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- iv. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Patton dalam Moeloeng, 2002:178)

Pada akhir wawancara juga pada saat penelitian berlangsung peneliti mengulangi garis besar apa yang telah apa yang telah dikatakan oleh informan dengan maksud agar dia memperbaiki bila ada kekeliruan atau menambah apabila masih ada kekurangan.

Selain itu peneliti juga mengcross checkan informasi yang diperoleh dari perempuan peserta pelatihan P2MBG di Kelurahan Panularan Kota Surakarta ini dengan Ketua Bidang atau Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta selaku penyelenggara P2MBG.

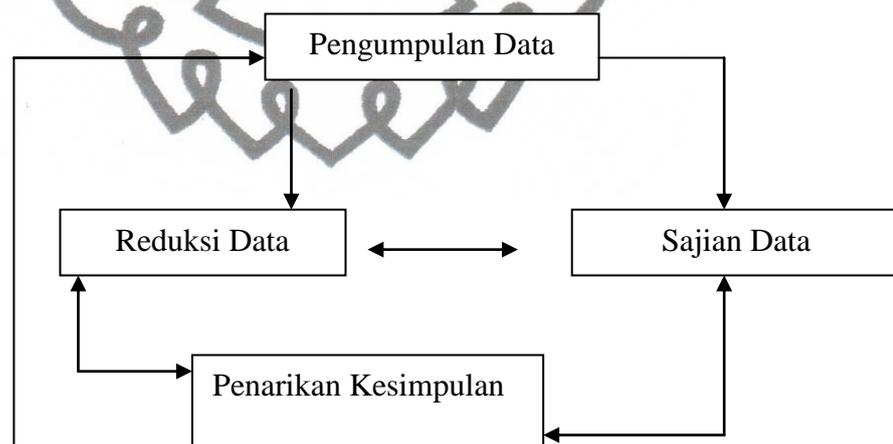
7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua macam teknik analisa, yakni teknik analisa sosiologis dengan menggunakan teknik analisa interaktif dan teknik analisa gender dengan digunakannya teknik analisa Longwe.

Yang dimaksud dengan analisa interaktif yaitu bahwa ketiga komponen aktifitasnya berbentuk Interaksi dengan proses pengumpulan data dari berbagai proses siklus. Dalam penelitian ini peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Bagan 1.2

Teknik Analisis Data



Sumber: Sutopo, 2002:96 (dikutip dari B. Matthew Miles & A. Michael Huberman, 2000)

Sedangkan yang dimaksud dengan teknik analisa Longwe adalah suatu kerangka untuk membantu orang memikirkan bagaimana pemberdayaan perempuan dan makna persamaan dalam praktik serta seberapa jauh suatu intervensi akan mendukung pemberdayaan ini.

commit to user

Pemberdayaan perempuan didefinisikan oleh Sara sebagai yang memungkinkan bagi kaum perempuan untuk mengambil tempat yang sama dengan laki-laki., dan untuk terlibat secara sama dalam proses pembangunan untuk mencapai kontrol atas faktor-faktor produksi di atas landasan yang sama dengan laki-laki.

Sara berpendapat bahwa literatur pembangunan yang mendefinisikan persamaan menurut sektor-sektor ekonomi dan masyarakat yang konvensional: persamaan dalam pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Kesukaran dengan sistem pembagian analitis ini adalah bahwa ia memberi fokus pada bidang kehidupan sosial dan bukan pada peran persamaan yang meningkat dalam proses pembangunan. Ia memperkenalkan lima tingkat persamaan yang berbeda sebagai landasan bagi kriteria untuk menilai tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial atau ekonomi (Oxfam untuk Gender Learning Team, 1996).

Tabel 1.5
Kerangka Pemberdayaan perempuan

Tingkat persamaan	
Kontrol	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Persamaan Meningkat ↑ </div> <div style="text-align: center;"> Pemberdayaan meningkat ↑ </div> </div>
Partisipasi	
Kesadaran	
Akses	
Kesejahteraan	

Sumber : Oxfam untuk Gender Learning Team, 1996

Dianjurkan bahwa tingkat persamaan ini berada dalam hubungan hierarkis, sehingga persamaan kontrol adalah lebih penting bagi pembangunan perempuan ketimbang persamaan kesejahteraan. Juga dianjurkan bahwa tingkat persamaan yang lebih tinggi secara otomatis

merupakan tingkat pembangunan dan pemberdayaan yang lebih tinggi. Misalnya, partisipasi yang sama dalam proses pembuatan keputusan tentang sumber daya tertentu adalah lebih berkenaan dengan pemberdayaan perempuan ketimbang akses yang sama terhadap sumberdaya, dan tidak juga sama pentingnya dengan kontrol yang sama.

Teknik Longwe mendasarkan pada pentingnya pembangunan bagi perempuan, bagaimana menangani issue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan dalam memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan upaya mencapai kesetaraan gender.

Tabel 1.6
Contoh Profil Gender dalam Program Pembangunan

Sektor	Proyek	Kesejahteraan	Akses	Penyadaran	Partisipasi	Kontrol
Pertanian						
Pendidikan dan Pelatihan						
Industri						
Proyek milik perempuan						

Sumber : *The Oxfam Gender Training Manual (terjemahan) dalam Widaningroem, 1998.*

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum

1. Kota Surakarta

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan “Kota Solo” secara umum memang dataran rendah. Kota Surakarta terletak di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah perhubungan antara propinsi Jawa Tengah – Jawa Timur dan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keadaan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Berbicara tentang letak daerah Surakarta, sebenarnya kota ini sangat strategis. Hal ini dikarenakan kota Surakarta sendiri merupakan jalur utama transportasi ke beberapa kota besar di Pulau Jawa. Kota – kota tersebut antara lain adalah Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Karena kota Surakarta yang strategis maka perkembangan kota ini memicu kegiatan ekonomi di berbagai sudut kota kecil disekitar wilayahnya antara lain Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar dan Wonogiri. Kotamadya Surakarta dibatasi oleh :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Dengan 51 Kelurahan, 595 RW dan 2.669 RT yang bergabung dalam 5 Kecamatan yaitu : Kecamatan Banjarsari 33% dari luas wilayah secara keseluruhan, Kecamatan Jebres 29%, Kecamatan Laweyan 20%, Kecamatan Pasar Kliwon 11% dan Kecamatan Serengan 7%. Kelima Kecamatan dan 51 Kelurahan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Laweyan : Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Sondakan, Kerten, Jajar dan Karangasem.
- b. Kecamatan Serengan : Danukusuman, Serengan, Tipes, Kratonan, Jayengan dan Kemlayan
- c. Kecamatan Pasar Kliwon : Joyontakan, Semanggi, Pasar Kliwon, Gajahan, Baluwarti, Kampung Baru, KedungLumbu, Sangkrah, dan Kauman.
- d. Kecamatan Jebres : Kepatihan Kulon, Kepatihan Wetan, Sudiroprajan, Gandekan, Kampung Sewu, Pucang Sawit, Jagalan, Purwodiningratan, Tegalharjo, Jebres, Mojosongo.
- e. Kecamatan Banjarsari : Kadipiro, Nusukan, Gilingan, Stabelan, Kestalan, Keprabon, Timuran, Ketelan, Punggawan, Mangkubumen, Manahan, Sumber dan Banyuanyar.

Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Surakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Laweyan	8,64
2	Serengan	3,19
3	Pasar Kliwon	4,82
4	Jebres	12,58
5	Banjarsari	14,81
	TOTAL	44,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta

Data kependudukan menurut catatan Surakarta dalam angka tahun 2007 adalah ; berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2007 penduduk kota Surakarta mencapai 515.372 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 12.827 jiwa/km². Dari luasan wilayah kota Surakarta yang hanya 44,04 km² menunjukkan bahwa kota ini merupakan kota yang padat penduduk.

Tabel 2.2
Banyaknya Keluarga Sejahtera Menurut Tahapan di Kota
Surakarta Tahun 2009

Kecamatan	PraKS Ekonomi dan non ekonomi	KS I Ekonomi dan non ekonomi	KS II	KS III	KS III Plus	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Laweyan	2099	3491	3792	7729	3796	20907
Serengan	1023	2035	2671	3727	1945	11401
Pasar Kliwon	1904	5014	5109	3622	2339	17988
Jebres	3479	6727	8019	8587	3933	30745
Banjarsari	3447	7626	9603	11609	6162	38447
Jumlah	11952	24893	29194	35274	18175	119488
2008	13567	26913	29590	32283	16520	118873
2007	13233	26982	29545	32645	15884	118289
2006	12622	29038	30268	30072	15745	117745
2005	10348	32529	29405	28093	13706	114027

Sumber : BPMPPA dan KB Kota Surakarta

Dapat dilihat dari tabel diatas mengenai banyaknya keluarga sejahtera menurut tahapan di Kota Surakarta tahun 2009 bahwa dari masih banyak keluarga di Kota Surakarta yang masih berada di garis kemiskinan. Dan dari tahun ke tahun angka kemiskinan tersebut cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk berkeluarga di Kota Surakarta.

2. Kelurahan Panularan

2.1 Kondisi Geografi

Kelurahan Panularan secara administratif termasuk di dalam Kecamatan Laweyan. Kelurahan Panularan terletak di sebelah selatan

Kota Surakarta, kelurahan Panularan sendiri mempunyai luas sebesar 5,445 ha. Berikut batas wilayah dari Kelurahan Panularan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Jayengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tipes
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sriwedari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bumi

2.2 Keadaan Penduduk

Dari laporan monografi Kelurahan Panularan bulan Juni tahun 2011, dilaporkan bahwa di Kelurahan Panularan tercatat 2385 jumlah kepala keluarga. Sementara jumlah penduduk sendiri dan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel di bawah ini,

Tabel 2.3
Penduduk dalam Kelompok Umur dan Kelamin tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	1169	1243	2412
5-9	462	464	926
10-14	418	416	834
15-19	521	538	1059
20-24	472	431	903
25-29	368	488	856
30-39	471	473	944
40-49	456	445	901
50-59	447	379	826
60+	106	112	218
Jumlah	4890	4989	9879

Sumber : Monografi kelurahan Panularan

Tabel 2.4
Mata Pencaharian (Bagi Umur 10 Tahun ke atas)

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani sendiri	-
2	Buruh tani	-
3	Nelayan	-
4	Pengusaha	795
5	Buruh Industri	1551
6	Buruh bangunan	1986
7	Pedagang	2026
8	Pengangkutan	720
9	Peg. Negeri (sipil/ TNI)	499
10	Pensiunan	389
11	Lain-lain	1445
	Jumlah	9411

Sumber : Monografi Kelurahan Panularan

Tabel 2.5
Penduduk Menurut pendidikan
(Bagi 5 Tahun ke atas)

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/Perg. Tinggi	764
2	Tamat SLTA	2969
3	Tamat SLTP	2869
4	Tamat SD	2631
5	Tidak tamat SD	250
6	Belum Tamat SD	378
7	Tidak Sekolah	50
	Jumlah	9911

Sumber : Monografi Kelurahan Panularan

Dapat diketahui jika sebagian besar jumlah penduduk di Kelurahan Panularan adalah perempuan. Menurut data dari BPS Kota Surakarta pada tahun 2009 sex ratio di Kelurahan Panularan adalah 97 dengan jumlah penduduk laki-laki 4766 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 4909 jiwa. Jika dibandingkan dengan data yang terbaru

maka di kelurahan panularan mengalami peningkatan jumlah penduduk.

Untuk mata pencaharian, di kelurahan panularan sangat beragam dan tidak didominasi oleh salah satu jenis pekerjaan saja. Di sektor pendidikan juga tidak terlalu memprihatinkan. Sudah banyak masyarakat yang menyelesaikan pendidikan formalnya walaupun tidak semuanya sampai ke jenjang yang lebih tinggi

B. Deskripsi Program Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG)

I. Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan dalam kerangka penanganan kemiskinan, maka kebijakan yang diambil dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) antara lain :

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat mitra melalui proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan.
3. Peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Peningkatan kualitas lingkungan.

5. Peningkatan kesempatan berusaha.
6. Peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program.
7. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan program.
8. Penguatan kelembagaan masyarakat.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

8. Surat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor B-51A/Meneg/PP/Dep.II/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Panduan Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000.
9. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor 411.4/132 tanggal 13 Pebruari 2007 perihal Buku Pedoman Pelaksanaan Program Terpadu P2MBG Propinsi Jawa Tengah.

III. Tujuan

1. Tujuan umum

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga.
- b. Meningkatkan kondisi, status dan kedudukan perempuan.
- c. Meningkatkan akses pada pendidikan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
- e. Meningkatkan status derajat kesehatan, termasuk hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

- f. Meningkatkan pola hidup sehat dan mewujudkan Desa/Kelurahan Sehat.
- g. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
- h. Meningkatkan pendapatan keluarga.
- i. Meningkatkan akses terhadap informasi pasar.
- j. Meningkatkan kualitas permukiman.
- k. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas produksi dan teknologi pertanian.
- l. Menumbuhkan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

IV. Strategi

Guna mempercepat terlaksananya kebijakan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG), maka diperlukan strategi yang meliputi :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kemiskinan.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan petugas dan masyarakat mitra.
3. Meningkatkan peran fasilitasi pemerintah.
4. Memantapkan keterpaduan dan koordinasi program kegiatan.

5. Menumbuhkan kemandirian masyarakat mitra dan penguatan kelembagaan masyarakat yang ada di Kelurahan.

V. Pemilihan lokasi kelurahan P2MBG

Kelurahan yang dipilih menjadi lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) adalah :

1. Kelurahan yang mempunyai karakteristik tingkat kemiskinan/masyarakat miskin.
2. Kriteria tingkat kemiskinan kelurahan ditentukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan kriteria Pra KS dan KS I.
3. Tingkat Kota menentukan satu atau lebih Kelurahan yang menjadi lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

VI. Pemilihan masyarakat mitra

Masyarakat Mitra yang dipilih menjadi subyek dalam Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) adalah :

1. Masyarakat Mitra yang terdiri dari keluarga inti (terdiri dari suami, istri, anak) termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (karena tidak adanya suami), yang berada di Kelurahan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG). Masyarakat mitra adalah

tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki, anak-anak dan dewasa.

2. Jumlah Masyarakat Mitra disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).
3. Kriteria pemilihan keluarga inti yang menjadi masyarakat Mitra adalah keluarga miskin, di mana kriteria tingkat kemiskinan ditentukan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang ada di Kelurahan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).

VII. Pengorganisasian

1. Propinsi

- a. Gubernur adalah penanggung jawab P2M-BG di tingkat Provinsi
- b. Tim Pelaksana P2M-BG dalam melaksanakan program kegiatan dapat bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat formal maupun non formal.
- c. Pelaksanaan P2M-BG perlu dibentuk Tim yang terdiri dari Badan/Dinas/Kantor di tingkat Provinsi, yang diketahui oleh Wakil Gubernur dan secara teknis dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani pemberdayaan masyarakat.

2. Kota Surakarta

- a. Walikota Surakarta adalah Penanggung Jawab Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).
- b. Tim pelaksana P2MBG dalam melaksanakan program kegiatan bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat formal maupun non formal seperti LSM, Lembaga kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dll.
- c. Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) adalah bentuk Tim yang terdiri dari Badan/Dinas/Kantor/Organisasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat di Tingkat Kota yang diketuai oleh Wakil Walikota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 411.4/173/I/2004 tentang Tim Pendamping Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) Kota Surakarta.

3. Kecamatan

- a. Camat adalah Penanggungjawab Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) di Tingkat Kecamatan.

- b. Tim pembina P2MBG dalam melaksanakan program kegiatan bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat formal maupun non formal seperti LSM, lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi dll.
 - c. Dalam pelaksanaan program kegiatan di kelurahan, tim pembina P2MBG kecamatan merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Kota Surakarta.
 - d. Pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) adalah bentuk tim yang terdiri dari kantor/organisasi masyarakat/lembaga masyarakat di Tingkat Kecamatan yang diketuai oleh Sekretaris Camat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.
4. Kelurahan
- a. Kepala Kelurahan adalah Penanggung Jawab pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).
 - b. Dalam pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) oleh Pemerintah Kelurahan, dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan dan fasilitator Kelurahan yang ada di Kelurahan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kelurahan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG).

- c. Jumlah fasilitator Kelurahan minimal 3 (tiga) orang terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan komposisi yang berimbang. Fasilitator Kelurahan ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah di Kelurahan.
- d. Fasilitator Kelurahan terdiri dari warga masyarakat yang berasal dari Kelurahan Lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG), yang dianggap mempunyai kemauan dan kemampuan sebagai seorang fasilitator

VIII. Tahapan kegiatan

Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan P2MBG dilaksanakan secara partisipatif yang memfokuskan pada proses belajar dan penyadaran kritis dengan melibatkan secara penuh perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan Program Terpadu P2MBG adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan data dasar

Kegiatan dalam penyusunan data dasar dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik partisipasi yang difasilitasi oleh Fasilitator Kelurahan , yang meliputi :

1. Identifikasi Masyarakat Mitra.
2. Identifikasi Masalah
3. Identifikasi Kebutuhan

commit to user

4. Identifikasi Potensi.

b. Perencanaan kegiatan

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat mitra dengan menggunakan teknik-teknik partisipasi dengan difasilitasi oleh fasilitator Kelurahan, yang meliputi :

1. Pengorganisasian masalah dan penentuan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani.
2. Pemecahan masalah dan penentuan prioritas pemecahan masalah yang dianggap tepat dengan melihat potensi yang ada di Kelurahan.
3. Penentuan program dan kegiatan.
4. Pembagian peran antara stakeholder dan masyarakat mitra.

c. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

1. Pengorganisasian masyarakat mitra
2. Proses belajar
3. Penumbuhan kesadaran kritis untuk menuju proses perubahan.
4. Fasilitasi
commit to user

d. Evaluasi kegiatan

Evaluasi pelaksanaan Program Terpadu P2MBG dilakukan oleh :

1. Masyarakat mitra dengan menggunakan teknik-teknik partisipatif.
2. Tim Pelaksana Program terpadu P2M-BG di semua tingkatan secara berjenjang (Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Jateng)

Waktu pelaksanaan evaluasi kegiatan Program Terpadu P2MBG :

1. Bagi masyarakat mitra disesuaikan dengan kesanggupan masyarakat mitra dan fasilitator Kelurahan,
2. Bagi Tim Pelaksana Program Terpadu P2MBG dilakukan sesuai kebutuhan.

IX. Program dan kegiatan

Dalam penentuan jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan melalui proses partisipatif, dengan disesuaikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat mitra serta potensi yang ada di Kelurahan. Sehingga tidak semua jenis program dan kegiatan nantinya bisa dilaksanakan. Adapun program dan kegiatan yang ditawarkan dalam Program Terpadu P2MBG adalah :

1. Peningkatan Akses pada Pendidikan

a. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mitra khususnya dan masyarakat di Kelurahan pada umumnya.
- Meningkatkan akses masyarakat mitra pada pendidikan dasar.

b. Bentuk Kegiatan.

- Kejar paket dan keaksaraan fungsional
- pemberian bea siswa bagi anak laki-laki dan perempuan, khususnya pada keluarga masyarakat mitra.
- Penyelenggaraan Taman Bacaan
- Penyelenggaraan sanggar belajar

2. Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan

a. Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat mitra, terutama yang berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan produksi pertanian, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pendapatan keluarga.

b. Bentuk Kegiatan

- Mengadakan demplot pertanian, sesuai dengan jenis pertanian yang menjadi andalan di Kelurahan lokasi P2MBG
- Mengadakan studi banding ke daerah yang mempunyai pertanian/perikanan/peternakan yang sudah dianggap baik.
- Mengadakan fasilitasi pada lembaga keuangan untuk permodalan bagi masyarakat mitra yang membutuhkan.

3. Peningkatan kualitas permukiman

a. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat mitra tentang perumahan dan permukiman sehat.
- Meningkatkan kualitas perumahan masyarakat mitra
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat mitra.
- Menciptakan lingkungan perumahan yang bersih dan sehat, bebas dari polusi.
- Mengembangkan manajemen pengelolaan sanitasi dan air bersih
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

b. Bentuk Kegiatan

- Pemugaran perumahan
- Pengadaan dan pemeliharaan sanitasi
- Penyediaan, distribusi dan pengelolaan air bersih
- Perbaikan, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
- Pemanfaatan pekarangan dan penghijauan
- Dan lain sebagainya

4. Peningkatan Status Kesehatan masyarakat

a. Tujuan

- meningkatkan pengetahuan masyarakat mitra tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi.
- Menurunkan kasus anemia pada Wanita Usia Subur (WUS), ibu hamil dan ibu nifas. *commit to user*

- Menurunnya kasus kesakitan dan kematian ibu hamil dan bersalin.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mitra tentang kehamilan sehat dan persalinan aman.

b. Bentuk kegiatan

- Pendidikan tentang gizi melalui kelompok setara (kelompok dewasa dan remaja)
- Bantuan tablet Fe (besi) untuk Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil.
- Pendidikan Pra nikah bagi calon pengantin.
- Sosialisasi tentang partisipasi KB laki-laki
- Sosialisasi tentang hak individu untuk ber KB.
- Sosialisasi "Menjadi Ayah" bagi laki-laki anggota masyarakat mitra.
- Belajar bersama tentang pengasuhan anak.
- Belajar bersama tentang kehamilan sehat dan persalinan aman.
- Diskusi melalui kelompok setara tentang penyakit seksual menular.
- Diskusi tentang HIV/AIDS
- Menumbuhkan Bank Darah dikalangan masyarakat.
- Menumbuhkan model Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
- Advokasi tentang hak-hak reproduksi.
- Sosialisasi tentang kehamilan sehat dan persalinan aman bagi suami istri.
- Dan lain sebagainya *commit to user*

5. Mewujudkan Kelurahan Sehat

a. Tujuan

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mitra tentang pola hidup sehat dan kesadaran untuk hidup sehat.
- Meningkatkan kualitas lingkungan (sanitasi dan hygiene)
- Mengembangkan pelayanan kesehatan dasar

b. Bentuk Kegiatan

- Peningkatan pengetahuan tentang pola makan sehat, melalui sosialisasi dan pelatihan.
- Kebersihan tubuh sendiri melalui sosialisasi dan kampanye
- Pemperantasan sarang nyamuk, melalui sosialisasi, gerakan pemberantasan sarang nyamuk, gerakan kebersihan lingkungan.
- Gerakan kebersihan sanitasi dan pembuangan air limbah.
- Pencegahan penyakit menular
- Deteksi dini kecacatan, melalui sosialisasi dan kampanye
- Sosialisasi tentang pengobatan dini
- Pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan bahaya obat adiktif
- Dan lain sebagainya.

6. Peningkatan Kesadaran Hukum

a. Tujuan

- Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian pada persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan peraturan perundang-undangannya.
- Menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (laki-laki dan perempuan), terutama yang berkaitan dengan produk hukum yang Anti Diskriminasi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Bentuk Kegiatan

- Identifikasi bersama masyarakat tentang kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang ada di sekitar mereka.
- Melakukan analisis sosial tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
- Sosialisasi dan pelatihan tentang kekerasan berbasis gender bagi tokoh masyarakat dan fasilitator kelurahan.
- Pembentukan mekanisme penanganan kasus kekerasan berbasis gender di tingkat masyarakat.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang berpihak ke perempuan.

7. Peningkatan Pendapatan Keluarga

a. Tujuan

- Menumbuhkan motivasi berusaha.
- Menumbuhkan kemampuan manajemen usaha.

- Menumbuhkan kemampuan manajemen keuangan.
- Menumbuhkan keterampilan menjual.
- Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan berusaha.
- Meningkatkan akses pada modal dan informasi pasar.

b. Bentuk Kegiatan

- Pelatihan tentang motivasi dan kepercayaan diri dalam berusaha.
- Pelatihan tentang manajemen usaha.
- Pelatihan tentang penggunaan teknologi pendukung usaha.
- Pelatihan tentang keterampilan menjual.
- Pelatihan tentang manajemen keuangan usaha.
- Fasilitasi pada lembaga permodalan.
- Membuka akses pada informasi pasar.

8. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berkoperasi

a. Tujuan

- Menumbuhkan motivasi dan kemampuan untuk berorganisasi
- Menumbuhkan kemampuan manajemen koperasi.
- Fasilitasi pembentukan jaringan usaha.

b. Bentuk kegiatan

- Pelatihan perkoperasian
- Pembentukan Pra Koperasi.
- Mengembangkan jaminan usaha.

X. Jangka waktu pelaksanaan program

1. Jangka waktu pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender di Kelurahan di Kota Surakarta dilakukan secara berkesinambungan.
2. Selama jangka waktu pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) berjalan di kelurahan yang ditunjuk saat itu, dapat mengembangkan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) ke kelurahan lain.
3. Jumlah kelurahan yang akan dikembangkan menjadi lokasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota Surakarta.

XI. Sumber biaya program P2MBG

Sumber biaya untuk menunjang pelaksanaan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) berasal dari :

1. Swadaya masyarakat
2. APBD Kota Surakarta (Block Grant, instansi masing-masing)
3. APBD Propinsi Jawa tengah (di instansi masing-masing)
4. Sumber dana lain yang tidak mengikat
5. APBN pada instansi masing-masing

XII. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program dan kegiatan, administrasi dan pelaporan
2. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode dialog dengan teknik Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok yang terarah, observasi dan kajian dokumen.
3. Pemantauan dilakukan di semua tingkatan oleh tim pelaksana program P2MBG secara periodik.
4. Hasil pemantauan dipergunakan untuk memeberikan umpan balik sebagai bagian dari proses refleksi guna perbaikan dalam penyempurnaan perencanaan aksi berikutnya serta untuk penyusunan dokumen pelaporan.

XIII. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan untuk melihat masalah dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan P2MBG.
2. Evaluasi dilaksanakan pada setiap proses tahapan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat mitra dengan difasilitasi oleh fasilitator kelurahan.
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan secara berjenjang oleh tim pelaksana P2MBG.

XIV. Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan P2MBG.

2. Materi pelaporan mencakup semua tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam P2MBG.
3. Pelaporan pelaksanaan P2MBG merupakan hasil dari kegiatan proaktif tim pelaksana P2MBG Kota Surakarta.
4. Pelaporan pelaksanaan P2MBG dilakukan setiap pelaksanaan tahapan kegiatan selesai dan akhir tahun.
5. Laporan Pelaksanaan P2MBG kelurahan disampaikan ke kecamatan, dari kecamatan ke kota dan dari kota ke provinsi.

(Sumber : Pedoman Pelaksanaan P2MBG

C. Peserta P2MBG di Kelurahan Panularan

Pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan berlokasi di RW 8. Di RW 8 terdapat delapan Rukun Tetangga (RT) dari RT 1 sampai dengan RT 8. Peserta P2MBG di Kelurahan Panularan mencakup dari seluruh RT di RW 8.

Tabel 2.6
Jumlah Masyarakat Mitra Kalurahan Panularan
Program pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender
(P2MBG)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-Laki	26
2	Perempuan	74
Jumlah		100

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Dari seratus peserta P2MBG Kelurahan Panularan tersebut baik laki-laki maupun perempuan, terbagi ke dalam empat kelompok kepelatihan. Setiap kelompok tidak terbatas jumlah anggotanya.

Tabel 2.7
Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Memasak

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	Fatonah	P
2	Ibu Mulyono	P
3	Ibu Eko Yulianto	P
4	Sariyem	P
5	Marsinah	P
6	Ibu Agus Susanto	P
7	Sri Wuhyani	P
8	Ibu Tugiyem	P
9	Ibu Sudiman	P
10	Sringatmiyun	P
11	Sri Setyarsih	P
12	Ibu Ponijan	P
13	Ibu Edi Sartono	P
14	Maryani	P
15	Ibu Karyadi	P
16	Ibu Suranto	P
17	Mbak Lis	P
18	Murti	P
19	Suharni	P
20	Harmini	P
21	Parni	P
22	Ibu Sugeng Sri Rahayu	P
23	Ibu Eko Sayekti	P
24	Ibu Setiyarso	P
25	Ibu Sumarno	P
26	Yustiar	P
27	Sri Jumani	P
28	Winarsih	P
29	Ibu Mulyadi	P
30	Mulyani	P
31	Menuk	P
32	Maryono	P
33	Ibu Kasyiadi	P
34	Fatimah	P
35	Lilik Wuryani	P
36	Reni	P
37	Sumardi	L
38	Ibu Maryoto	P
39	Didit Kurniawan	L
40	Robin Tukul	L

41	Saldik	L
42	Tiwuk	P
43	Mulud Haryadi	L
44	Sudadi	L
45	Yanti	P
46	Dalimin	L
47	Yunianto	
48	Juyaidi	L

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Tabel 2.8
Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Menjahit

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	Sri Mulyani	P
2	Sardiman	P
3	Rabiyem	P
4	Juhariyah	P
5	Padmi	P
6	Agus Istanto	L
7	Ibu Parto	P
8	Etna S	P
9	Ibu Iyas	P
10	Ranti	P
11	Kuspriyanto	L
12	Sugiyo	L
13	Sri Suharni	P
14	Maryani	P
15	Purwanti	P
16	Sarjiman	L
17	Sri Mulyani	P
18	Martiningsih	P
19	Sri Yahmini WL	P
20	Rohiyatun	P
21	Agus Wiranto	L
22	Maryanto	L

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Tabel 2.9
Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Tata Rias

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	Ibu Wagiyem	P
2	Ning Hartini	P
3	Ibu Sugianto	P
4	Ibu Surya Dewantoro	P
5	Sri Rahayu	P
6	Marni	P
7	Heruwati	P
8	Ngatini	P
9	Winarni	P
10	Sarno	P
11	Ibu Widodo	P
12	Nurjanah	P
13	Ninik	P
14	Aprilia Wijayanti	P
15	Esal felaini	P
16	Dra. Nungki	P
17	Sri Wahyuningsih	P
18	Ibu Erwin	P
19	Sri Hadiati	P

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Tabel 2.10
Jumlah Peserta P2MBG Kelompok Bengkel

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	Edi Santoso	L
2	Sumadi	L
3	Topik	L
4	Suryadi	L
5	Marsudi	L
6	Topo	L
7	Sarsiman	L
8	Harno	L
9	Trimo	L
10	Kawit	L
11	Widodo	L

Sumber : Bapermas PP PA & KB

Dari 100 masyarakat di Kelurahan Panularan itulah yang terdaftar dan lolos sebagai peserta P2MBG Kelurahan Panularan. Para peserta

tersebut yang akan mengikuti segala bentuk kegiatan yang telah disusun. Baik saat sosialis, pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2010 dan peserta tersebut yang akan menerima bentuk bantuan yang akan diberikan untuk mendukung terciptanya peningkatan kualitas hidup perekonomian keluarga mereka.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROFIL INFORMAN

Informan dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Penelitian ini bersifat *snowball sampling*, maka penulis memilih informan yang berasal dari Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bapermas Kota Surakarta karena dianggap oleh penulis dapat memenuhi kriteria batasan penelitian. Subyek yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan kepada masyarakat yang dianggap mengetahui dan mengikuti tentang P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender). Partisipasi masyarakat tersebut yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kelurahan Panularan khususnya RW 8 dalam Kegiatan P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat peserta P2MBG selaku responden, peneliti ambil dari sudut pandang masyarakat.

Pada pada penelitian ini, awalnya peneliti mengambil salah satu pengampu, pelaksanaan dari P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) adalah Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bapermas Kota Surakarta. Kemudian menentukan responden dengan ketentuan bahwa responden adalah masyarakat RW 8 Kelurahan

commit to user

Panularan yang mengikuti P2MBG. Informan yang dipilih tersebut kemudian akan dapat menunjukan kepada peneliti untuk menuju ke informan lain dan responden selaku penerima program, pilihan responden dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data sesuai tujuan penelitian sesuai dengan teknik pengambilan sample peneliti yang menggunakan *snowball sampling*. Peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan kepada informan tersebut karena peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Sehingga penelitian ini diharapkan mendapatkan rumusan yang berguna.

Berikut merupakan data mengenai informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini :

1. Ibu Endang Sri Anti

Beliau adalah Kasubid Bidang Pemberdayaan Perempuan Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Bapermas Kota Surakarta di tunjuk sebagai penyelenggara P2MBG di Kota Surakarta termasuk di Kelurahan Panularan. Ibu Endang Sri Anti di dalam pelaksanaan P2MBG adalah sebagai pengampu dan pelaksana P2MBG dari awal hingga akhir. Bu Endang Sri Anti mengarahkan peneliti untuk menemui Ibu Tiwuk selaku ketua kelompok salah satu pelatihan dalam P2MBG yang lebih mengetahui keadaan di lokasi.

B. Ibu Tiwuk (41 tahun)

Ibu Tiwuk sebagai salah satu ketua kelompok sekaligus peserta pelatihan memasak di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus menerima pesanan makanan dari masyarakat. Bertempat tinggal di RT 02 RW 8 Kelurahan Panularan. Bu Tiwuk juga mengarahkan dan menemani peneliti untuk menemui para responden (peserta P2MBG lainnya)

Selanjutnya adalah data mengenai responden yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Ibu Ning Hartini (43 tahun)

Ibu Ning hartini sebagai salah satu ketua kelompok sekaligus peserta pelatihan tata rias di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja dengan membuka usah tata rias di rumahnya. Bertempat tinggal di RT 02 RW 8 Kelurahan Panularan.

2. Bapak Widodo (45 tahun)

Bapak Widodo sebagai salah satu ketua kelompok sekaligus peserta pelatihan bengkel di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja di keamanan di Kantor Kelurahan Panularan sebagai hansip. Bertempat tinggal di RT 03 RW 8 Kelurahan Panularan.

3. Ibu Margini (46 tahun)

Ibu Margini sebagai salah satu peserta pelatihan memasak di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal RT 06 RW 8 Kelurahan Panularan.

4. Ibu Sri Handayani (53 tahun)

Ibu Sri Handayani sebagai salah satu peserta pelatihan memasak di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menerima pesanan makanan dari masyarakat. Bertempat tinggal di RT 06 RW 8 Kelurahan Panularan.

5. Bapak Rejeb (55 tahun)

Bapak Rejeb sebagai salah satu peserta pelatihan bengkel di dalam P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai sopir becak. Bertempat tinggal di RT 02 RW 8 Kelurahan Panularan.

6. Agus Istanto (45 tahun)

Bapak Agus Istanto sebagai salah satu peserta pelatihan menjahit pada P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai guru SMP di sekolah swasta di Surakarta, sekaligus menjabat sebagai Ketua RT 02. Bertempat tinggal di RT 02 RW 08 Kelurahan Panularan.

7. Sri Mulyani (52 tahun)

Ibu Sri Mulyani sebagai salah satu peserta pelatihan menjahit pada P2MBG di Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di RT 08 RW 8 Kelurahan Panularan.

8. Suranti (32 tahun)

Ibu Suranti sebagai salah satu peserta pelatihan tata rias pada P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bertempat tinggal di RT 02 RW 8 Kelurahan Panularan.

9. Bapak Agus Wiranto (44 tahun)

Bapak Agus Wiranto sebagai salah satu peserta pelatihan menjahit pada P2MBG Kelurahan Panularan. Bekerja sebagai karyawan di pabrik tekstil di Surakarta, beliau juga merupakan adik kandung dari Bapak Agus Istanto. Bertempat tinggal di RT 02 RW 8 Kelurahan Panularan.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat yang baik adalah partisipasi yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Memfokuskan isu jender dengan memberikan peluang kepada perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, akan berpengaruh bukan saja terhadap kinerja suatu program, tetapi juga memberdayakan perempuan dan menimbulkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap suatu sumber usaha. Selain itu, partisipasi ini dapat pula dipandang sebagai salah satu wujud dari demokratisasi dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat. Pemberdayaan sebagai paradigma baru dalam pembangunan, dikatakan terlaksana dengan baik apabila masyarakat ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil – hasil pembangunan. P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) sebagai salah satu reaksi dari paradigma ini, menjadikan peran masyarakat sebagai hal yang penting. Oleh karena itu partisipasi masyarakat seutuhnya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun

pemanfaatan sangatlah diperlukan. Response baik masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan – kegiatan P2MBG (Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender) sangat diperlukan agar pelaksanaan proyek ini tepat sasaran.

Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat peserta P2MBG akan terlihat seiring berjalannya proses kegiatan P2MBG secara keseluruhan. Adapun tahapan dan susunan kegiatan di dalam P2MBG di Kelurahan Panularan sesuai dengan buku pedoman P2MBG terbagi menjadi 4 (empat) bagian :

1. Perencanaan kegiatan
 - Penentuan Lokasi
 - Seleksi Peserta
 - Sosialisasi
2. Pelaksanaan Program
3. Pemanfaatan Program
4. Evaluasi

Semua tahapan tersebut kecuali tahapan evaluasi sudah dilaksanakan di RW 08 Kelurahan Panularan, seperti yang diungkapkan Ibu Tiwuk (ketua kelompok memasak) ,bahwa :

“Kegiatannya 2 kali sosialisasi di RW dan Kelurahan, 1 kali di balai kota. Yang di sini nanti praktek masak (pelaksanaan program) seminggu, besuknya dikasih bantuan di kelurahan (pemanfaatan program). Wah, belum ada yang ke sini mas buat tanya-tanya bantuanne. Peserta lainne ya belum didatangi semua kok mas? Jadi belum ada evaluasi dari balai kota” (wawancara 13 Agustus 2011).

Pernyataan dari Ibu Tiwuk ini berbeda dari apa yang diutarakan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti saat menjelaskan tahapan dari kegiatan P2MBG di Kelurahan Panularan, bahwa :

“Evaluasi hasilnya seperti apa, tujuannya kan meningkatkan kesejahteraan melalui ketrampilan, apakah dari hasil pelatihan itu bermanfaat. Yang mengevaluasi adalah tim dengan cara di survey satu persatu.” (wawancara 14 Juli 2011).

Sampai dengan penelitian ini disusun tahap evaluasi P2MBG belum juga dilaksanakan.

B.1 Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan P2MBG

Di dalam perencanaan kegiatan P2MBG di kelurahan panularan terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu penentuan lokasi, seleksi peserta dan sosialisasi. Dari beberapa rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan P2MBG ini, maka akan didapat berbagai macam bentuk – bentuk partisipasi masyarakat.

B.1.1 Penentuan lokasi

Penentuan lokasi tempat berlangsungnya dan diadakannya kegiatan P2MBG ditentukan dari Kelurahan lewat Musrenbangkel. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

commit to user

“Penentuan lokasi, kalau pas di kelurahan Panularan yang ditentukan adalah di RW 8 dan yang menentukan itu adalah dari kelurahan lewat Musrenbangkel dan sesuai dengan SK tentang kriteria masyarakat miskin.” (wawancara 14 Juli 2011).

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Tiwuk salah satu peserta P2MBG Kelurahan Panularan yang saat berlangsungnya musrenbangkel ikut sebagai peserta perempuan, bahwa :

“Sebenarnya pas musyawarah itu semua RW diberi kesempatan untuk ikut P2MBG, tetapi banyak RW lain yang menolak ikut karena dulu dikira untuk kegiatan lomba antar RW dan nanti dinilai. Jadi sing (yang) kebagian dari RW 8 untuk ikut, soalnya kalau dilihat dari kondisi di RW 8 juga nggak merata mas.” (wawancara 13 Agustus 2011).

Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Agus Istanto salah satu peserta P2MBG yang juga Ketua RT 2 RW 8, bahwa:

“Di musyawahkan di tingkat kelurahan mas untuk penyelenggaraan P2MBG ini, banyak yang menolak saat ditawarkan untuk jadi lokasi P2MBG. Terus didapat kalau RW 8 yang nanti akan jadi tempat untuk penyelenggaraan P2MBG di Kelurahan Panuularan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Dari pernyataan tersebut dapat ditemukan bahwa pemilihan dan penentuan lokasi P2MBG di Kelurahan Panularan melibatkan partisipasi masyarakat Panularan. Disebut demikian karena proses penentuan lokasi tersebut terjadi di dalam musrenbangkel dan dihadiri oleh beberapa masyarakat Panularan baik laki-laki maupun perempuan. Melalui musrenbangkel partisipasi masyarakat akan termasuk ke dalam partisipasi

masyarakat yang terorganisasi, karena terjadi bila struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Maka penentuan lokasi P2MBG di Kelurahan ini sangat terencana dan disiapkan lewat musrenbangkel sehingga keterlibatan masyarakat Panularan baik laki-laki maupun perempuan sangat penting.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat ditemukan lagi di dalam musrenbangkel ini termasuk di dalam bentuk partisipasi yang terpaksa. Partisipasi terpaksa sendiri berarti partisipasi yang terpaksa karena keadaan kondisi ekonomi sosial. RW 8 terpaksa menjadi tempat penyelenggaraan karena semua RW banyak yang menolak dan RW 8 mendapat pertimbangan untuk mengadakan P2MBG dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat di sana yang tidak merata.

Matrik 3.1

Keterlibatan Responden dalam Penentuan Lokasi P2MBG

No.	Responden	Hadir di Musrenbangkel	Kapasitas di Musrenbangkel	Aktifitas di Musrenbangkel
1.	Ibu Tiwuk	Hadir	Perwakilan perempuan Rt 2 RW 8	Menyetujui hasil musyawarah penentuan lokasi P2MBG di RW 8
2.	Bapak Agus Istanto	Hadir	Perwakilan warga RT 2 RW 8 (Ketua RT)	Menyetujui hasil musyawarah penentuan lokasi P2MBG di RW 8

Selain Ibu Tiwuk dan Bapak Agus Istanto, para responden lain dalam penelitian ini tidak mengikuti acara penentuan lokasi penyelenggaraan P2MBG di Kelurahan Panularan. Karena penentuan lokasi untuk penyelenggaraan P2MBG melalui musrenbangkel atau musyawarah tingkat kelurahan, maka peserta yang hadir adalah pejabat tingkat kelurahan beserta jajarannya, baik pamong wilayah, Ketua RW, Ketua RT, perwakilan Ibu dari PKK dan juga perwakilan dari pemuda setempat bisa Karang Taruna atau dari forum anak. Sehingga memang tidak semua warga bisa mengikuti kegiatan musrenbangkel, karena sudah terdapat perwakilan yang mewakili lingkungan mereka. Jadi responden yang mempunyai kedudukan dalam sosial masyarakat yang mengikuti kegiatan penentuan lokasi untuk penyelenggaraan P2MBG Kelurahan Panularan lewat musrenbangkel.

B.1.2 Seleksi peserta

Setelah penentuan lokasi pelaksanaan P2MBG ditetapkan di RW 8 Kelurahan Panularan, maka tahap selanjutnya adalah seleksi peserta. Tidak semua yang mendaftar menjadi peserta otomatis akan menjadi peserta P2MBG. Terdapat persyaratan yang disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) tentang penyelenggaraan P2MBG. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Seleksi karena banyaknya data yang masuk, setelah itu baru di survey untuk mengetahui dan menentukan 100 peserta. Yang menentukan 100 peserta resmi dari kami melalui

survey yang disesuaikan SK. Sebenarnya yang ingin mendaftar banyak tapi anggaran hanya cukup 100 peserta.” (wawancara 14 Juli 2011)

Dari situ tampak sekali bahwa partisipasi masyarakat RW 8 untuk mengikuti P2MBG sangat besar. Akan tetapi mengingat anggaran untuk pelaksanaan P2MBG ini sangat terbatas, yaitu hanya cukup untuk 100 (seratus) peserta saja maka perlu seleksi sesuai dengan kriteria masyarakat miskin yang terdapat di buku pedoman masyarakat. Seleksi peserta P2MBG tidak terfokus pada salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang boleh mengikutinya, ini sesuai yang diutarakan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti tentang siapa saja yang boleh mengikuti P2MBG, bahwa :

“Ya masyarakat miskin tadi, misal per KK ada lima orang maka kita ambil satu dan harus sudah berkeluarga. Dan bebas, tidak laki-laki atau perempuan, semua boleh mendaftar tergantung siapa yang mau dan mampu. Akan tetapi mayoritas yang ikut adalah perempuan.” (wawancara 14 Juli 2011)

Memang benar dari mayoritas 100 (seratus) peserta tersebut adalah perempuan dengan rincian 74 peserta adalah perempuan dan 26 peserta adalah laki-laki. Tetapi memang tidak ada keharusan jenis kelamin tertentu dalam menentukan peserta karena memang ada survey dari pihak pemerintah sebagai salah satu langkah dalam menyeleksi peserta P2MBG. Bisa dilihat juga dari pernyataan Ibu Ning Hartini, bahwa :

“Yang banyak ikut itu banyak ibu-ibu, pas pertemuan yang aktif ibu-ibu karena yang bapak-bapak pada kerja, bapak ngikut aja. Makane sing (makanya yang) diwakilkan saya untuk ikut P2MBG.” (wawancara 13 Agustus 2011).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tiwuk, bahwa :

“Saat ndaftar atas nama saya, lha bapak nggak bisa kalau harus ikut karena pas jam kerja mburuh jahit. Jadwalnya pagi soalnya mas, jadi bapak-bapak banyak yang kerja.” (wawancara 13 Agustus 2011).

Sementara Bapak Rejeb mengungkapkan bahwa :

“Dari Pak RT terus ada sosialisasi. Ada perintah dari Pak RT untuk ikut program. Kebetulan dipilih alias lolos jadi peserta, lumayan mas mengke dapet (nantu dapat) bantuan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Lain halnya dengan ungkapan dari Ibu Margini, bahwa :

“Daftar sendiri ke Pak RT, terus dipilih jadi peserta. Sebelumnya di teliti dulu kaliyan (dengan) pihak pemkot. Bapak nggak mau ikut daftar, jadi saya yang jadi wakil.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani, bahwa :

“Di kasih undangan dari Kelurahan. Berangkat sendiri mas, pertama kali tidak tahu, trus karena ibu-ibu harus kreatif untuk nambah income suami. Daftar lewat RT lalu nanti di survey mas sama ibu-ibu PNS.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara pernyataan dari Ibu Sri Mulyani, perihal seleksi peserta dan mendaftar sebagai peserta P2MBG, bahwa :

“Bibar ndaftar ten RT mangke di survey kaliyan pegawai balai kota mas, nunggu mawon lolos mbotene, alhamdullilah kulo riyin lolos.” (setelah mendaftar di RT nanti di survey sama pegawai balai kota mas, menunggu saja lolos tidaknya, alhamdullilah saya dulu lolos) (wawancara 15 Agustus 2011)

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Suranti tentang seleksi peserta P2MBG, bahwa :

“Ndaftar ten Pak Agus (ketua RT 2) terus let seminggu di survey kaliyan ibu-ibu PNS kalih Pak Agus.”(mendaftar Pak Agus lalu jeda satu minggu di survey dengan ibu-ibu PNS bersama Pak Agus) (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Agus Istanto juga menjelaskan perihal seleksi dan pendaftaran peserta P2MBG, bahwa :

“Nanti warga sini (RT 2) yang mau mendaftar bisa nitip lewat saya atau langsung ke kelurahan. Nanti pas survey saya temani dari Bapermasnya sekalian supaya nanti warga saya bisa lolos jadi peserta.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Agus Wiranto juga menambahkan lewat pernyataannya, bahwa :

“Ndaftar lewat Mas kulo (saya), Mas Agus Istanto. Sekalian di survey kaliyan (dengan) Mas Agus bareng pegawai pemkot. Yang lolos dan ikut banyak yang ibu-ibu.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Widodo juga menyampaikan, bahwa :

“Saya langsung ke Kelurahan ndaftare, sekalian berangkat kerja. Saya tidak di survey, lha mpun ngerti (sudah tahu) kalau saya itu keadaannya gimana, lha wong nggih (lha sudah) kenal sama orang-orang kelurahan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Terlihat jika banyaknya peserta perempuan dikarenakan memang saat mendaftar kebanyakan bapak-bapak bentrok dengan jam kerja, sehingga banyak bapak-bapak yang mewakili istrinya untuk mengikuti karena waktunya yang masih bisa untuk mengikuti P2MBG ini. Tidak ada keharusan

kaum perempuan yang dicari dalam pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan. Dengan semakin banyaknya peserta perempuan di P2MBG bisa dikatakan jika partisipasi masyarakat Kelurahan Panularan sudah berjalan dengan baik karena melibatkan semua masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketidakadilan gender di dalam penentuan peserta kegiatan P2MBG di Kelurahan Panularan.

Bentuk partisipasi masyarakat yang bisa ditemukan di dalam proses seleksi peserta ini antara lain adalah partisipasi yang spontan, dikarenakan masyarakat langsung melibatkan dirinya dengan cara mendaftar begitu P2MBG ditetapkan dilaksanakan RW 8. Tetapi nantinya tidak semua warga RW 8 yang mendaftar dapat berpartisipasi karena terbatasnya anggaran penyelenggaraan program dan terdapat kriteria sebagai peserta, yaitu masyarakat miskin yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan P2MBG. Di dalam proses seleksi peserta juga terdapat bentuk partisipasi masyarakat yang lain, yaitu partisipasi masyarakat yang tidak langsung. Dikatakan partisipasi masyarakat yang tidak langsung karena terdapat peserta yang mendaftar atau mengikuti karena merupakan wakil atau mendelegasikan hak partisipasinya. Ini dijumpai saat ibu-ibu mendaftar karena sang suami atau bapak tidak bisa berpartisipasi mengikuti P2MBG karena terkendala dengan pekerjaan, sehingga bapak-bapak meminta istrinya untuk mewakilinya dengan mendaftar P2MBG, akan tetapi tidak dengan atas nama suaminya melainkan mendaftar atas nama sendiri.

Matrik 3.2
Keterlibatan Responden dalam Seleksi Peserta

Responden	Cara Mendaftar	Survey	Keterangan
Ibu Tiwuk	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Sri Handayani	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta..
Sri Mulyani	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Margini	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Pak Rejeb	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot dan Ketua RT	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Suranti	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot dan Ketua RT	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Ning Hartini	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot dan Ketua RT	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Pak Agus I	Mendaftar sendiri	Di survey oleh pihak Pemkot	<ul style="list-style-type: none"> Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta. Ikut mendampingi pihak pemkot saat mensurveiarganya
Pak Agus W	Mendaftar lewat RT	Di survey oleh pihak Pemkot dan Ketua RT	Hanya sebagai obyek untuk di survey, tidak bisa menentukan lolos tidak sebagai peserta.
Pak Widodo	Mendaftar ke Kelurahan	Tidak di survey	Sudah kenal dengan pihak Kelurahan jadi tidak perlu di survey

Jadi setiap warga RW 8 Kelurahan Panularan bisa mendaftar atau mengajukan diri sebagai peserta kegiatan P2MBG. Tidak harus laki-laki atau perempuan, yang penting adalah sesuai dengan kriteria masyarakat miskin sesuai pedoman P2MBG dan harus mau sekaligus mampu mengikuti semua kegiatan P2MBG nantinya. Untuk membatasi peserta karena disesuaikan dengan anggaran maka Bapermas Kota Surakarta mengadakan survey untuk memilih 100 (seratus) peserta sesuai dengan kriteria tersebut. Sehingga Bapermas Kota Surakarta yang berhak menentukan siapa saja yang nantinya akan lolos sebagai peserta P2MBG.

B.1.3 Sosialisasi dan keterlibatan peserta perempuan maupun laki-laki dalam proses sosialisasi

Dalam tahap sosialisasi dalam perencanaan diperlukan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, karena dalam tahap ini masyarakat diajak untuk membuat suatu keputusan yang menyangkut kebutuhan hidup mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mempunyai rasa memiliki, sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab untuk turut menyukseskan.

Proses sosialisasi di dalam kegiatan perencanaan P2MBG di RW 08 Kelurahan Panularan bertujuan untuk menunjukkan dan memberikan informasi kepada peserta tentang P2MBG dan program – programnya. Sesuai seperti yang diutarakan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Sosialisasi untuk menunjukkan ini lho P2MBG itu dan ini adalah program – programnya. Yang mengadakan sosialisasi bisa dari kita, Perlindungan anak, KB untuk menyinergikan dengan program – program yang lain seperti RTLH. Dalam sosialisasi ini juga dipilih 10 fasilitator untuk mendampingi peserta.” (Wawancara 14 Juli 2011)

Melalui sosialisasi yang pihak Bapermas selaku pelaksana P2MBG di Kelurahan Panularan bisa memberikan penjelasan tentang P2MBG kepada peserta yang terpilih untuk mengikuti P2MBG. Sosialisasi P2MBG sendiri diadakan sebanyak 3 (tiga) kali. Dua kali dilaksanakan di Balai Kota Surakarta dan sekali dilaksanakan di tempat kediaman Bapak Mujiyono (Ketua RW 8) Kelurahan Panularan. Ini merupakan penuturan dari beberapa peserta P2MBG, seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Handayani, bahwa :

“1 kali di tempate Pak Mujiyono ikut, 2 kali di balai kota satu kalinya mboten ikut. Ngepasi mboten saged soale Mas? Jadwal dari bapermas, nunggu aja.” (wawancara 18 Agustus 2011).

Hal senada juga diutarakan Ibu Tiwuk yang mengatakan, bahwa :

“Kegiatan awal itu sosialisasi di Balai Kota 2 hari pada pagi hari, sosialisasi di RW 8 selama 1 hari.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rejeb selaku peserta P2MBG pelatihan bengkel, bahwa :

“Kadang ikut, kadang tidak ikut, sudah ada jadwalnya. Cuma mendengarkan sosialisasi P2MBG di Pak RW (Mujiyono)” (wawancara 18 Agustus 2011)

Sementara yang diutarakan oleh Ibu Ning Hartini adalah, bahwa :

“Kegiatan awal itu sosialisasi di Balai kota 2 hari pada pagi hari, sosialisasi di RW 8 selama 1 hari, sekali pas di balai kota tidak ikut, karena pas repot.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Pernyataan hampir serupa juga dilontarkan oleh Pak Agus Istanto, bahwa :

“Sosialisasi 3 kali, sehari di sini (RW 8), dua hari di balai kota. Saya pas di balai kota dulu nggak ikut sekali, ada jam ngajar soalnya. Tapi adik saya bisa ikut, jadi nanti tinggal tanya sama adik saya ada info apa.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Ibu Suranti juga menyatakan hal yang hampir sama mengenai kehadirannya di dalam kegiatan sosialisasi, bahwa :

“Dateng mas nten nggene Pak Mujiyono, ten balai kota inggih dateng, tapi sekali kulo mboten dateng ten balai kota.”(Datang mas di tempatnya Pak Mujiyono, di balai kota juga datang tapi sekali saya tidak datang di balai kota) (wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara pernyataan yang berbeda diutarakan oleh Pak Widodo terkait kehadirannya dalam kegiatan sosialisasi, bahwa :

“Kegiatan sosialisasi selama tiga hari, dua kali di balai kota, sekali di Pak Mujiyono, Pak RW itu mas. Dateng terus kulo (saya) mas, jadwal sudah diedarkan sama kelurahan nanti. Jadi ya tinggal dateng aja.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Margini, bahwa:

“Pas kegiatan sosialisasi mbahas P2MBG, ikut terus. Datang sendiri, kalau tidak salah 3 kali mas sosialisasinya. 2 kali di balai kota, sekali di RW. (wawancara 15 Agustus 2011)

Pak Agus Wiranto juga mengatakan hal yang sama, bahwa :

“kegiatan pertama itu sosialisasi di balai kota dua hari, setelah itu sehari di tempatnya Pak RW. Datang terus mas, syaratnya katanya pemkot harus selalu datang terus. Kebetulan bisa ijolan (gantian) shift sama temen di pabrik.”
(wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara Ibu Sri mulyani mengatakan perihal kegiatan di awal P2MBG, bahwa :

“Kulo pas sosialisasi hadir terus mas, lha mboten enten gawean dadine nggih saged ikut terus. Berangkat nggih bareng kalihan ibu-ibu mriki.” (saya saat sosialisasi hadir terus mas, lha tidak ada kerjaan jadi ya bisa ikut terus. Berangkat ya bareng dengan ibu-ibu sini)
(wawancara 15 Agustus 2011)

Dapat diketahui jika proses sosialisasi selalu diikuti oleh setiap peserta P2MBG, walaupun terdapat beberapa peserta yang tidak selalu rutin mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut karena terdapat keperluan sendiri. Padahal melalui sosialisasi tersebut sudah ada anjuran untuk selalu mengikuti setiap rangkaian kegiatan P2MBG, karena untuk memperlancar proses kegiatan dan penyerahan bantuan di akhir kegiatan nanti. Seperti yang di utarakan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Dari awal hingga akhir yaitu tingkat kehadiran yang sak karepe dewe, mungkin karena tingkat kebutuhan yang berbeda. Misal mengantar anak. Ya karena kegiatan ini kan informal bukan formal jadi tidak ada aturan paksaannya, padahal sudah ditakut takuti kalau tidak hadir tidak dapat bantuan. Target di anggaran dan di masyarakat itu berbeda.”
(wawancara 14 Juli 2011).

commit to user

Terdapat beberapa peserta P2MBG yang tidak selalu rutin mengikuti setiap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dalam hal ini Bapermas Kota Surakarta yang menjadi penyelenggaranya. Tapi memang pihak Bapermas sendiri tidak dapat menekan atau memaksa mereka untuk selalu datang, karena memang tidak ada aturan yang mengikat untuk selalu datang bagi peserta P2MBG.

Dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta P2MBG dalam proses sosialisasi P2MBG di Kelurahan Panularan secara tidak langsung terjadi bentuk – bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi yang terjadi adalah partisipasi sebagian karena masyarakat atau seseorang dalam hal ini adalah para peserta P2MBG baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak terlibat didalam seluruh kegiatan. Peserta P2MBG dalam kegiatan sosialisasi yang digelar sebanyak tiga kali terdapat beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut secara rutin dengan alasan yang berbeda-beda.

Di dalam P2MBG di Kelurahan Panularan pesertanya tidak hanya terdiri dari satu jenis kelamin saja tetapi melibatkan perempuan dan laki – laki, walaupun jumlah peserta kegiatan pelatihan P2MBG Kelurahan panularan ini sebagian besar pesertanya adalah perempuan. Lalu apakah di dalam proses sosialisasi ini terdapat perbedaan antara peserta perempuan dan peserta laki – laki. Dari beberapa penuturan peserta tidak ada perbedaan antara peserta laki-laki dengan perempuan di dalam proses kegiatan sosialisasi. *commit to user*

Seperti di dalam pemilihan tentang jenis pelatihan yang ingin diikuti, semua peserta baik laki-laki dan perempuan bebas menentukan pilihan tentang jenis pelatihan yang akan diikuti sesuai kemauan mereka sendiri. Ibu Tiwuk sebagai peserta yang selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi menuturkan, bahwa :

“Bebas, kalau usulan itu begini, yang seneng njahit siapa, mbecak siapa, yang seneng masak siapa, nanti langsung masuk di bidang sing disenengi. Tapi yang milih inggih bareng – bareng, mangke tinggal hubungi ketua kelompoknya.” (wawancara 13 Agustus 2011).

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh Kasubid Pemberdayaan Perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti tentang pemilihan pelatihan yang akan diikuti peserta P2MBG, bahwa :

“Peserta bebas menentukan pelatihan sesuai keinginan dan ketrampilan, kami tidak memaksa. Tapi ya kemauan peserta kan berubah – ubah dan kadang sok nganyelke misalnya pas pelatihan minta di masak tapi pas pemberian bantuan minta gerobak.” (wawancara 14 Juli 2011).

Pemilihan jenis pelatihan di dalam proses sosialisasi jelas tidak ada perbedaan dan paksaan antara peserta perempuan dan peserta laki – laki. Semua peserta bebas untuk mengikuti jenis pelatihan yang akan diselenggarakan di kelurahan Panularan, yaitu pelatihan bengkel, tata rias, memasak dan menjahit. Dari semua jenis pelatihan itu, pemilihan peserta akan jenis pelatihan yang akan diikuti sudah bisa ditebak. Secara otomatis maka peserta laki – laki akan memilih pelatihan bengkel, sedangkan jenis pelatihan memasak, tata rias dan menjahit didominasi oleh peserta perempuan. Walaupun di dalam pelatihan menjahit terdapat peserta laki-

laki yang mengikutinya. Ini seakan sudah menjadi stigma masyarakat kalau laki-laki pasti akan bengkel dan perempuan nantinya memasak, menjahit dan menata rias. Akan tetapi di dalam P2MBG ini tentunya pemilihan pelatihan bukan didasari cara pikir peserta yang seperti itu. Pemilihan jenis pelatihan didasarkan pada kebutuhan mereka saat itu, kemauan mereka dan keahlian mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ning Hartini tentang alasan ikut P2MBG pelatihan tata rias, bahwa :

“Ingin sendiri, ingin tahu dan ingin bisa, sekalian karena sudah punya usaha rias sendiri jadi bisa tambah berkembang.” (wawancara 13 Agustus 2011).

Hal senada juga diungkapkan Pak Rejeb peserta pelatihan bengkel tentang alasan mengikuti pelatihan bengkel, bahwa :

“Tambah – tambah biaya hidup dengan membecak, sudah punya becak sebelum, yang bantuan disewakan.” (wawancara 13 Agustus 2011).

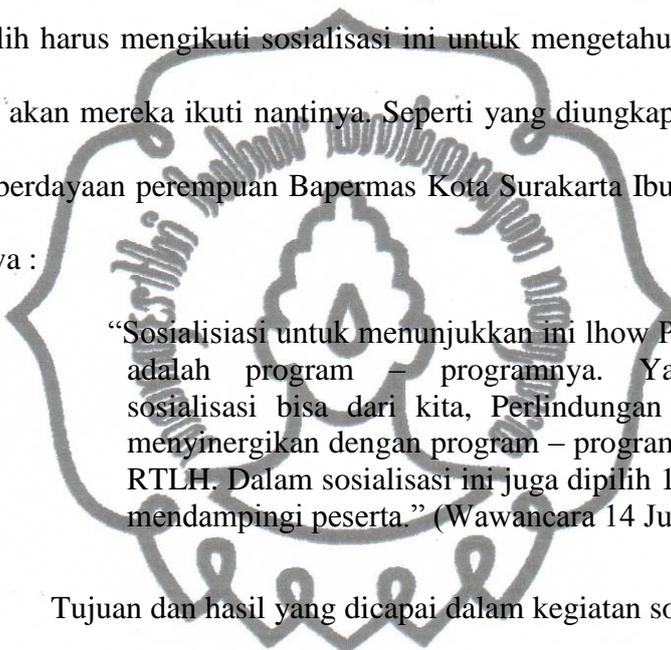
Pak Agus Istanto sebagai peserta laki – laki di pelatihan menjahit yang didominasi peserta perempuan juga menyatakan keinginannya ikut pelatihan menjahit, bahwa :

“Ingin nambah pengetahuan menjahit, dulu pernah menjahit dan sampai sekarang juga masih bisa menjahit. Nanti bantuan mesin jahitnya dicoba buat njahit sendiri, syukur – syukur nanti kedepannya bisa buat nerima pesanan. Tidak malu mas, lha Adik saya (Agus Wiranto) juga ikut latihan njahit juga.” (wawancara 15 Agustus 2011).

Jelas terlihat tidak ada paksaan atau karena rasa malu di dalam pemilihan jenis pelatihan yang akan diikuti oleh peserta P2MBG, karena memang itu sudah sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan minat mereka

sendiri-sendiri. Terlebih tidak ada perbedaan dalam pemilihan pelatihan antara peserta laki-laki dan perempuan.

Adapun acara yang dilaksanakan dalam tahap sosialisasi itu sendiri adalah mendengarkan program – program yang ada dan saling berkaitan satu sama lain dengan P2MBG. Peserta P2MBG yang sudah terpilih harus mengikuti sosialisasi ini untuk mengetahui tentang program yang akan mereka ikuti nantinya. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :



“Sosialisasi untuk menunjukkan ini lhow P2MBG itu dan ini adalah program – programnya. Yang mengadakan sosialisasi bisa dari kita, Perlindungan anak, KB untuk menyinergikan dengan program – program yang lain seperti RTLH. Dalam sosialisasi ini juga dipilih 10 fasilitator untuk mendampingi peserta.” (Wawancara 14 Juli 2011)

Tujuan dan hasil yang dicapai dalam kegiatan sosialisasi ini selain pengenalan dari P2MBG sendiri, kebanyakan adalah mengangkat tentang permasalahan yang saat itu sedang melanda dan terdapat di RW 8. Baik masalah kesehatan, ekonomi dan permasalahan anak yang saat itu sedang terjadi. Masalah-masalah yang diangkat tersebut di dalam proses sosialisasi memang diangkat supaya memunculkan partisipasi masyarakat untuk semakin peka terhadap permasalahan yang saat itu sedang melanda di sekitar lingkungannya dan masyarakat semakin tahu akan kebutuhan, tahu akan kekurangannya dan tahu tentang apa yang harus dilakukannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Margini tentang hasil yang didapat dalam kegiatan sosialisasi P2MBG tersebut, bahwa :

“Sosialisasi KB, Koperasi semua dijelaskan terus mengetahui masalah-masalah anak. Anak harus begini-begitu, terus cara mencari pinjaman.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ning Hartini, bahwa :

“Membahas pengangguran, pemabuk, perumahan liar dan semua dicari permasalahannya. Sosialisasi KB, koperasi sama disisipi P2MBG”. (wawancara 13 Agustus 2011)

Pernyataan juga di kemukakan oleh Ibu Tiwuk, bahwa:

“Ya tentang penentuan masalah di kampung, sosialisasi kesehatan, KB kaliyan permasalahan Koperasi. (wawancara 13 Agustus 2011)

Sementara pernyataan dari Pak Agus Istanto juga sama, bahwa :

“Kalau hasilnya Cuma menyangkut permasalahan wilayah sini aja kok Mas? Bisa masalah ekonomi, anak putus sekolah, sosialisasi KB, selain tentunya pas di balai kota pertama kali itu dikasih pengertian tentang P2MBG”. (wawancara 15 Agustus 2011)

Jawaban yang singkat juga diutarakan oleh Pak Rejeb, bahwa :

“Tahu tentang materi P2MBG” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal tersebut sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti tentang hasil yang dicapai dalam pertemuan sosialisasi, bahwa :

“Setelah sosialisasi maka ada musyawarah masyarakat mitra, fasilitator yang sudah dilatih disuruh untuk mendampingi peserta musyawarah. Musyawarah ini sesuatu dari partisipasi masyarakat, jadi masyarakat diberi wacana, wawasan supaya tahu kekurangan, kebutuhan, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kami dan masyarakat tahu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, tahu

pemecahan masalah, lalu disimpulkan dan nanti akan tahu kalau masyarakat itu nantinya butuh penyuluhan, pelatihan, bantuan modal, pembinaan. Selama musyawarah ada bimbingan untuk mencari solusi dan di sini nanti masyarakat yang menentukan bentuk-bentuk pelatihan ketrampilannya.” (wawancara 14 Juli 2011)

Selain untuk memberikan pengertian mengenai P2MBG dan permasalahan mengenai kondisi lingkungan sekitar, lewat sosialisasi juga digunakan untuk memilih fasilitator atau nanti di dalam kerjanya disebut ketua kelompok yang nantinya ditugasi untuk mengkoordinir masing-masing anggotanya. Di dalam P2MBG di Kelurahan Panularan ini terpilih 10 fasilitator, terdiri dari 8 (delapan) perempuan yang mengkoordinir 3 (tiga) jenis pelatihan yaitu masing-masing 2 fasilitator mengkoordinir satu pelatihan, yaitu pelatihan memasak (yang bantuannya peralatan masak), menjahit dan tata rias. Sementara 2 (dua) fasilitator laki-laki masing-masing mengkoordinir jenis pelatihan memasak (yang bantuannya gerobak) dan bengkel.

Ini sudah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Sosialisasi untuk menunjukkan ini lho P2MBG itu dan ini adalah program – programnya. Yang mengadakan sosialisasi bisa dari kita, Perlindungan anak, KB untuk menyinergikan dengan program – program yang lain seperti RTLH. Dalam sosialisasi ini juga dipilih 10 fasilitator untuk mendampingi peserta. Setelah sosialisasi maka ada musyawarah masyarakat mitra, fasilitator yang sudah dilatih disuruh untuk mendampingi peserta musyawarah. Musyawarah ini sesuatu dari partisipasi masyarakat, jadi masyarakat diberi wacana, wawasan supaya tahu

kekurangan, kebutuhan, dan tahu apa yang harus dilakukan.” (Wawancara 14 Juli 2011)

Pernyataan yang singkat juga dijelaskan oleh Ibu Tiwuk sebagai ketua kelompok memasak mengenai tugas sebagai ketua kelompok, bahwa:

“Mencatat anggota-anggota yang mau ikut di pelatihan masak, dipilih selalu hadir rapat dan membagikan undangan.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ning hartini sebagai ketua kelompok tata rias, bahwa :

“Mengkoordinir pendaftaran peserta ingin ikut pelatihan apa, khususnya RT1 dan RT2.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Widodo sebagai ketua kelompok bengkel, bahwa :

“Ndaftari bapak-bapak yang mau ikut pelatihan mbengkel, memberi informasi sekalian ngiderke undangan, terus ndampingi pas dibagi-bagi kelompok.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara itu berdasar pernyataan dari Ibu Endang dan para ketua kelompok di atas mengenai tugas yang diemban para fasilitator atau ketua kelompok terpilih selain mengkoordinir peserta adalah sebagai pendamping saat pelaksanaan proses sosialisasi dengan membaaur bersama peserta yang lain serta memberikan informasi kepada para peserta dengan cara membagikan undangan terkait kegiatan P2MBG. Pemilihan fasilitator itu juga tidak dipilih secara sepihak dari Bapermas tetapi melibatkan partisipasi peserta di dalam musyawarah. Pemilihan sebagai fasilitator atau

ketua kelompok itu sendiri merupakan bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat RW 8 di dalam P2MBG ini, yaitu selain sebagai peserta merangkap sebagai ketua kelompok.

Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Ibu Tiwuk, bahwa :

“Sebagai ketua kelompok di bidang masak, dipilih saat pertemuan di RW, yang milih bareng-bareng.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal serupa juga diutarakan oleh Ibu Ning Hartini, bahwa :

“Sebagai Ketua kelompok di tata rias, ditunjuk karena sudah punya usaha rias sebelumnya jadi ditunjuk pengurus pas musyawarah kelompok, mungkin karena saya sudah punya usaha rias jadi ditunjuk ibu-ibu.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Sama juga seperti yang dituangkan oleh Pak Widodo, bahwa :

“Saya sebagai ketua ketua kelompok mbengkel, yang milih ya Pak Topik, Pak Rejeb, trus Pak Sumadi, bareng-bareng mas milihnya. Ditunjuk alasane bapak-bapak waktu saya longgar dan dirasa bisa masalah bengkel.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Dilihat dari pernyataan dari ketua kelompok tersebut, jelas tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penentuan ketua kelompok atau fasilitator yang nantinya akan mengkoordinir dan mendampingi para peserta P2MBG. Pemilihan tidak berdasar dan memandang jenis kelamin apa dari peserta yang cocok untuk menjadi fasilitator di setiap jenis pelatihan yang akan didampinginya. Memang dari 10 (sepuluh) fasilitator yang terpilih sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan dengan 8 (delapan) fasilitator dibandingkan dengan laki-laki yang mewakilkan 2 (dua) fasilitator. Tetapi pemilihan dilakukan

karena memang peserta yang terpilih sebagai fasilitator lewat musyawarah itu dirasa mampu dan dianggap mempunyai keahlian di bidang pelatihan oleh para peserta P2MBG. Jadi bukan karena jenis kelamin yang terbiasa dengan pelatihan itu lalu dimasukkan ke dalam pelatihan tersebut dan menjadi ketua kelompoknya.

Dari terpilihnya para fasilitator tersebut dan telah melaksanakan tugasnya masing-masing, maka para fasilitator terpilih tersebut termasuk dalam bentuk partisipasi masyarakat secara langsung. Dikatakan partisipasi langsung dikarenakan para fasilitator tersebut melaksanakan kegiatan tertentu didalam proses partisipasi seperti mengambil peranan di dalam pertemuan-pertemuan dan turut dalam diskusi.

Peserta P2MBG Kelurahan Panularan yang terdiri laki-laki dan perempuan juga diberi kebebasan saat mengutarakan pendapat di dalam pertemuan sosialisasi. Karena memang semua peserta mengikuti kegiatan sosialisasi ini di tempat yang sama dan waktu yang sama tanpa ada batasan-batasan. Hal ini diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Jumlah peserta yang paling banyak perempuan, yang paling menonjol adalah perempuan karena kaum laki-laki karena banyak yang perempuan mungkin isin(malu), tetapi yang laki-laki juga rajin datang dalam setiap kegiatan, dan aktif juga dalam acara, padahal banyak ibu-ibunya. Semua sama dan ikut terlibat dalam kegiatan, tidak ada perbedaan.”
(wawancara 14 Juli 2011)

Sementara pernyataan yang diungkapkan Ibu Sri Handayani seputar kebebasan mengeluarkan pendapat antara peserta laki-laki dan perempuan serta tugas dalam pertemuan sosialisasi, bahwa :

“Mendengar sosialisasi dan manfaatnya. Bapak-bapak hanya pas ditanya aja njawabnya, banyak ibu-ibu jumlah pesertanya.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Rejeb secara singkat juga menambahi tentang kebebasannya dalam mengutarakan pendapat saat pertemuan, bahwa :

“Tidak ada pembeda, ming mantuk-mantuk mawon (hanya mengiyakan saja.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Ungkapan senada juga diutarakan oleh Pak Agus Istanto, bahwa :

“Bebas, semua boleh bicara pas waktunya, tapi banyake ya cuma ngrungokke aja materi dari sana. Lha pas dibikin kelompok itu nanti banyak yang usul mengenai permasalahan lingkungan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Sama juga dengan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani, bahwa :

“Kebanyakan ming mirengke mawon kok mas, Nggih mangke bapak napa ibu-ibu nggih usul. Kulo mboten pernah usul mas.” (Kebanyakan hanya mendengarkan saja kok mas, ya nanti bapak apa ibu-ibu ya usul. Saya tidak pernah usul mas)
(wawancara 15 Agustus 2011)

Ibu Tiwuk juga memberikan pernyataan yang hampir sama, bahwa :

“Bebas, kalau usulan itu begini, yang seneng njahit siapa, mbecak siapa, yang seneng masak siapa, nanti langsung masuk di bidang sing disenengi (yang disukai). Tapi yang milih nggih(ya) bareng-bareng, mangke(nanti) tinggal

hubungi ketua kelompoknya.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Ning Hartini terkait dengan kebebasan pendapat, bahwa :

“Yang banyak ikut itu banyak ibu-ibu, pas pertemuan yang aktif ibu-ibu karena yang bapak-bapak pada kerja, bapak ngikut aja. Ya ada laki-lakine, ya itu di gerobag dan becak.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Sementara apa yang yang diungkapkan oleh Pak Widodo juga tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh para responden lain, bahwa:

“Semua bebas mau usul apa, yang penting tidak ngawur. Kalau saya ya usul supaya ada pelatihan bengkel dengan latihan memperbaiki becak. Tapi kalau yang lain biasanya mung mendengarkan saja, tapi ya ada beberapa yang sering bertanya.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Agus Wiranto menyatakan hal yang hampir sama dengan kebanyakan responden, bahwa :

“Nggak ada larangan untuk berpendapat mas, semua boleh tanya. Kalau saya sama bapak-bapak yang lain hanya mendengarkan saja materi yang disampaikan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu Margini, bahwa :

“Kegiatan hanya mendengarkan saja yang disampaikan pembicara, kita ya sesekali tanya disambi ngguyoni (melucu). Bapak-bapak seneng banget kalau ada yang lucu. Tapi ya tinggal datang, duduk terus ngrungokke (mendengarkan) aja.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara Ibu suranti mengungkapkan sedikit alasan mengenai kebebasan berpendapat bagi para peserta, bahwa :

“Mboten pernah usul mas, isin kulo. Ikut liyane mawon.”
(wawancara 15 Agustus 2011)

Dapat terlihat jika memang dalam pelaksanaan sosialisasi tidak ada perbedaan yang bisa mempengaruhi partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi P2MBG. Setiap peserta baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dalam menyampaikan usul atau pendapat dalam forum. Memang dari jumlah peserta yang sebagian besar adalah perempuan sehingga peran perempuan dalam pertemuan itu dinilai sangat ramai atau aktif, tetapi hal itu tidak menutup para peserta laki-laki untuk menyampaikan pendapatnya.

Kebanyakan yang dilakukan peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah hanya mendengarkan saja dan terkesan ikut dengan apa yang nanti disampaikan oleh pihak pemerintah. Peserta hanya diberi kesempatan untuk bebas memilih jenis pelatihan apa yang nantinya akan diikuti. Maka bentuk partisipasi peserta P2MBG di dalam mengikuti pertemuan sosialisasi ini dikategorikan sebagai partisipasi yang sebagian karena peserta tidak seluruhnya terlibat dan aktif dalam berpendapat dan terkesan pasif karena hanya mendengarkan saja.

Matrik 3.3

Keterlibatan Peserta Perempuan dan laki-Laki dalam Sosialisasi

Responden	Kehadiran dalam kegiatan sosialisasi	Mengutarakan pendapat		Peran dalam kegiatan sosialisasi
		Ya	Tidak	
Ibu Tiwuk	Selalu hadir	Sering bertanya dan usul		Ketua kelompok memasak dan peserta memasak
Ibu Ning Hartini	Sekali tidak hadir	Sering, terutama mengusulkan pelatihan menjahit		Ketua kelompok tata rias dan peserta tata rias
Ibu Sri Handayani	Sekali tidak hadir		Hanya mendengarkan	Sebagai peserta memasak
Ibu Margini	Selalu hadir		Hanya mendengarkan	Sebagai peserta memasak
Ibu Sri Mulyani	Selalu hadir		Hanya mendengarkan	Sebagai peserta Menjahit
Ibu Suranti	Sekali tidak hadir		Hanya mendengarkan karena malu	Sebagai peserta tata rias
Pak Rejeb	Kadang-kadang		Hanya mendengarkan	Sebagai peserta bengkel
Pak Agus Istanto	Sekali tidak hadir	Sering bertanya dan usul		Sebagai peserta menjahit
Pak Agus Wiranto	Selalu hadir		Hanya mendengarkan	Sebagai peserta menjahit
Pak Widodo	Selalu hadir	Sering bertanya dan usul tentang pelatihan bengkel		Sebagai Ketua kelompok bengkel dan peserta bengkel

Partisipasi beberapa peserta P2MBG memang tidak selalu rutin mengikuti setiap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dalam hal ini Bapermas Kota Surakarta yang menjadi penyelenggaranya. Tapi memang pihak Bapermas sendiri tidak dapat menekan atau memaksa mereka untuk selalu datang, karena memang tidak ada aturan yang mengikat untuk selalu datang bagi peserta P2MBG. Sementara tidak ada batasan atau perbedaan antara peserta perempuan dan peserta laki-laki di dalam pelaksanaan sosialisasi. Para peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan dan bisa menyampaikan pendapat atau masukan bagi pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan. Akan tetapi kenyataan memang hanya sedikit saja para peserta yang mau bertanya atau menyampaikan pendapat dan kebanyakan adalah cenderung pasif karena hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Tidak adanya keberanian dan rasa malu untuk menyampaikan pendapat juga menjadi alasan untuk tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan kepada peserta.

Matrik 3.4
Bentuk Partisipasi Masyarakat di dalam Keseluruhan Kegiatan Perencanaan Program

NO	Tahapan	Kategori Bentuk Partisipasi Masyarakat	Uraian
1	Penentuan Lokasi	Partisipasi yang terpaksa	Masyarakat RW 8 terpaksa menjadi lokasi pelaksanaan P2MBG karena kondisi sosial ekonomi
2	Seleksi Peserta	partisipasi yang spontan	dikarenakan masyarakat langsung melibatkan dirinya dengan cara mendaftar begitu P2MBG ditetapkan dilaksanakan RW 8.
		Partisipasi masyarakat yang tidak langsung	terdapat peserta yang mendaftar atau mengikuti karena merupakan wakil atau mendelegasikan hak partisipasinya. Bapak menyuruh istrinya untuk mewakilnya
3	Sosialisasi	partisipasi sebagian	karena masyarakat atau seseorang dalam hal ini adalah para peserta P2MBG baik secara langsung ataupun tidak langsung tidak terlibat didalam seluruh kegiatan. Terutama seluruhnya tidak terlalu terlibat dan aktif dalam berpendapat dan terkesan pasif karena hanya mendengarkan saja.

B.2 Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P2MBG

Tidak banyak kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan. Kegiatan yang dilaksanakan hanya pelatihan ketrampilan terhadap para peserta yang sudah terpilih dan mendaftarkan ke para ketua kelompok tentang jenis pelatihan yang akan diikuti. Terdapat 4 (empat) jenis pelatihan yang diadakan dalam P2MBG di kelurahan Panularan, yaitu pelatihan memasak, menjahit, tata rias dan bengkel. Supaya kegiatan pelatihan ini berjalan lancar tentunya sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat peserta P2MBG. Peserta P2MBG dalam kegiatan pelatihan ini dilatih oleh instruktur dari pihak pemerintah supaya nantinya materi yang disampaikan bisa menjadi modal keahlian untuk digunakan dalam berusaha meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya.

Seperti yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Pelaksanaan hanya kegiatan pelatihan ketrampilan saja selama 1 minggu (5 hari), menjahit, memasak, bengkel, _anya_ias, dan yang menentukan itu dari masyarakat peserta . kita yang memfasilitasi seperti pengadaan bahan masak, jahit, alat alat masak. Yang menjadi juru latihnya dari pihak kami juga. Ada juga uang ganti transport lima ribu setiap peserta tiap harinya.” (wawancara 14 Juli 2011)

Di dalam kegiatan pelatihan P2MBG, peserta benar-benar diperhatikan oleh penyelenggara P2MBG dalam hal ini adalah Bapermas Kota Surakarta. Peserta sudah tidak perlu lagi membawa peralatan, karena semua sudah disediakan oleh Bapermas. Untuk biaya transportasi juga

diperhitungkan dengan pemberian uang sebesar Rp 5.000,00 sebagai pengganti transportasi peserta. Uang transportasi diberikan setelah acara pelatihan selesai setiap harinya dan khusus untuk peserta yang datang dan mengisi daftar absensi.

B.2.1 Pelatihan memasak

Kelompok pelatihan memasak adalah jenis pelatihan yang paling banyak pesertanya, yaitu 48 peserta yang mengikuti pelatihan memasak. Pelatihan memasak sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pelatihan memasak yang nantinya pemberian bantuannya berupa peralatan masak yang ketua kelompoknya yaitu Ibu Tiwuk dan Ibu Maryani mengkoordinir 36 peserta dan kelompok pelatihan masak yang nantinya bantuannya berupa gerobak dikoordinir oleh Bapak Wardoyo yang mengkoordinir 12 peserta. Walaupun terbagi menjadi 2 (dua) kelompok tetapi pada saat pelatihan tetap digabung menjadi satu dan dilatih dengan materi yang sama, hanya nanti bentuk bantuannya saja yang berbeda. Peserta pelatihan memasak sebenarnya tidak semuanya adalah perempuan, terdapat juga beberapa peserta laki-laki. Tetapi peserta laki-laki tersebut nantinya digantikan oleh istri mereka saat mengikuti pelatihan karena memang mendaftarnya dulu memakai atas nama suaminya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tiwuk selaku koordinator kelompok memasak, bahwa :

“Yang menentukan dirinya sendiri pas mendaftar kegiatan, tetapi pada waktu pertama kedua kali pas pelatihan masih boleh pindah seterusnya harus difokuskan karena nanti

yang mendaftar akan sulit. Kebanyakan nanti bapak-bapak yang mendaftar ikut masak Cuma ingin dapet bantuan gerobaknya, nanti pas pelatihan yang menggantikan ibu-ibu.” (wawancara 13 agustus 2011)

Di dalam pelaksanaan pelatihan memasak diajarkan beberapa macam menu sebagai materi yang diajarkan instruktur kepada para peserta memasak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tiwuk selaku ketua kelompok sekaligus peserta memasak terkait kegiatan yang dilakukan dalam proses pelatihan, bahwa :

“Jadwal yang pelatihan yang menentukan Bapermas, kegiatannya dulu masak, yang jahit menjahit, yang becak bengkel. Kalau masak itu ada 15 macam menu yang dilatih, 1 hari 3 menu. Yang nglatih ada instruktur sendiri-sendiri.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Sri Handayani sebagai peserta pelatihan memasak, bahwa :

“Diajari cara bikin resoles, roti, pudding. Yang ngajari ibu-ibu dari pihak PNS kok mas sebagai instruktur nya dua orang.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Ibu margini secara singkat juga menuturkan perihal kegiatan pelatihan memasak, bahwa :

“Memasak bikin roti selama seminggu (5 hari), diajari instruktur nya” (wawancara 15 Agustus 2011)

Selama lima hari peserta diajari dan diberikan materi tentang cara pembuatan berbagai jenis menu makanan. Tercatat dari penuturan peserta diatas terdapat 15 macam menu yang dipaparkan dan diajarkan kepada peserta oleh instruktur nya dengan rincian 3 (tiga) menu setiap pertemuan

berlangsung. Jadi peserta tidak hanya diajari hanya satu varian menu saja tetapi menu yang diajari sangat bervariasi.

Dengan banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan memasak, tidak semua peserta bisa melakukan praktek membuat langsung menu yang diajarkan. Instruktur hanya memilih dua orang dari peserta untuk membantunya membuat masakan yang sedang diajarkan. Sementara peserta yang lain hanya duduk memperhatikan, dan nantinya bisa bertanya jika ada sesuatu yang belum jelas.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Tiwuk tentang keaktifannya selama kegiatan pelatihan memasak berlangsung, bahwa :

“Aktif sebagai peserta , ikut membantu pas praktek dan tanya kalau enggak tahu. Keinginan belum puas, terlalu singkat waktu pelatihan, terus pas pelatihan kalau kita belum memahaminya nanti ketinggalan, kita harus tanya sendiri, tanya pembuatan kremes dulu. Padahal suasana rame banget jadi instruktur kadang nggak tahu jadi ya langsung dibalaskan prakteknya.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Pernyataan dari Ibu Margini semakin mempertegas tentang keterlibatan peserta dalam pelatihan memasak, bahwa :

“Aktif sebagai peserta , sering tanya kalau tidak tahu, tanya tentang pembuatan kremes. Prakteknya cuma membantu instuktur, dan yang ingin tahu harus mendekat, jadi mboten kabeh praktek sendiri-sendiri. (wawancara 15 Agustus 2011)

Sementara Ibu Sri Handayani memgemukakan pernyataannya, bahwa :

“Hanya melihat saja mas, tidak bisa praktek satu persatu. Rame banget suasanane, jadine ya nggak kedengaran instruksi dari instruktur.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Melalui pernyataan diatas bisa dilihat jika tidak semua peserta bisa ikut mempratekkan materi yang diajarkan. Disebabkan pula karena hanya terdapat satu set peralatan masak hanya untuk instruktur saja, sehingga peserta tidak memungkinkan untuk bisa mencoba mempratekkan sendiri kecuali harus ikut mengajukan diri untuk membantu instruktur saat pelatihan membuat makanan.

Dari beberapa fakta yang didapat dari penuturan beberapa peserta pelatihan memasak dapat ditemukan beberapa bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat pertama yang didapat saat proses pelatihan memasak dilakukan adalah partisipasi masyarakat yang sebagian dan terbatas, karena memang para peserta pelatihan memasak baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pelatihan memasak. Para peserta tidak semuanya bisa mempratekkan materi yang diajarkan kecuali jika mau membantu instruktur untuk membuat masakan tersebut. Kendala terbatasnya alat praktek juga menyebabkan para peserta tidak semuanya bisa praktek langsung. Bentuk partisipasi kedua adalah partisipasi masyarakat yang tidak langsung, dikarenakan terdapat beberapa peserta khususnya peserta laki-laki yang mendelegasikan haknya untuk berpartisipasi dalam

kegiatan pelatihan itu kepada istrinya untuk mengikuti kegiatan pelatihan memasak.

Matrik 3.5

Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Memasak

Responden	Peran dalam Pelatihan	
	Praktek	Mengemukakan Pendapat
Ibu Tiwuk	Pernah praktek dengan cara membantu instruktur saat mendemonstrasikan cara memasak	Sering bertanya jika tidak tahu
Ibu Margini	Ikut membantu instruktur saat praktek	Bertanya tentang pembuatan kremes
Ibu Sri Handayani	Tidak pernah praktek	Tidak pernah tanya karena suasana ramai

Para peserta pelatihan memasak tidak semuanya dapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam mempraktekkan materi yang diajarkan instruktur. Dikarenakan memang tidak disediakannya peralatan untuk masing-masing peserta, peserta hanya bisa ikut mencoba mempraktekkan jika membantu instruktur. Jadi setiap hari instruktur akan memilih peserta yang berbeda dari hari sebelumnya untuk bisa membantunya membuat masakan sebagai materi pelatihan bagi para peserta. Suasana menjadi semakin tidak kondusif karena dengan banyaknya peserta yang hanya melihat pasti akan banyak bicara sendiri-sendiri, hal itu menyebabkan situasi menjadi ramai. Dengan

keadaan yang ramai maka terdapat peserta yang enggan menyampaikan pertanyaan padahal banyak diantara mereka yang belum paham.

B.2.2 Pelatihan menjahit

Di dalam pelatihan menjahit terdapat 22 peserta yang mengikuti meliputi peserta laki-laki dan peserta perempuan. Memang peserta perempuan lebih dominan dengan 17 peserta dan peserta laki-laki 5 (lima) peserta. Pelatihan menjahit sendiri juga dilatih oleh seorang instruktur untuk melatih para peserta untuk bisa membuat pakaian dengan desain dan mode yang menjadi materi pelatihan. Semua peralatan jahit termasuk mesin jahit disediakan oleh panitia kepada para peserta pelatihan. Sehingga setiap peserta bisa mempraktekkan langsung materi yang disampaikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Agus Istanto sebagai peserta pelatihan menjahit, bahwa :

“Kalau pas pelatihan praktek itu, peserta dikasih desain pola baju, lha nanti peserta mulai membuat sesuai dengan gambar itu. Instrukturnya juga ikut membuat sebagai contoh nantinya. Pelatihannya bertahap kok mas dulu itu, jadi hari pertama itu pelatihan motong kain, terus bikin pola, terus dijahit, lha nanti pas hari terakhir pakaian harus sudah jadi sesuai desain yang diberikan. Jadi harus serius dan tanya kalau kesulitan supaya tidak ketinggalan”
(wawancara 15 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Wiranto yang juga peserta pelatihan menjahit, bahwa :

“Praktek bikin baju sesuai gambar dari instruktur, terus nggih peserta langsung saged praktek sesuai urutan yang diarahkan instruktur. Hari terakhir praktek baju sudah jadi, instruktur mengke mbij sing apik terus sesuai desain. Kebetulan dulu nggen kulo sing dielem (punya saya yang dipuji). Peserta lain banyak yang nggak numpuk, ada sing ming (cuma) lihat tok pas diajari praktek. Tapi ya banyak yang tanya kalau sudah ketinggalan sama instruktur.”

Dibandingkan dengan peserta pelatihan memasak, peserta pelatihan menjahit sangat diuntungkan dengan para peserta menjahit bisa langsung mempratekkan materi yang diajarkan karena alat jahit, mesin jahit, dan bahan sudah disediakan oleh panitia. Maka bentuk partisipasi masyarakat yang didapat dari pelatihan menjahit ini adalah partisipasi masyarakat langsung, karena peserta bisa dan melaksanakan kegiatan praktek dalam pelatihan menjahit. Dengan disediakannya alat dan bahan yang menunjang kegiatan, maka semakin memudahkan peserta pelatihan menjahit dalam berpartisipasi di kegiatan pelatihan menjahit. Selain bentuk partisipasi masyarakat langsung juga terdapat bentuk partisipasi masyarakat yang lain dalam pelatihan menjahit yaitu partisipasi masyarakat yang sebagian. Terdapatnya partisipasi masyarakat yang sebagian dikarenakan adanya beberapa peserta yang tidak aktif dalam kegiatan pelatihan menjahit, peserta tersebut dapat alat dan disediakan mesin jahit tetapi hanya sekedar melihat, mendengarkan dan sesekali mencoba mempratekkan dan hasilnya mereka tidak mampu menyelesaikan pakaian yang menjadi hasil akhir dari materi pelatihan menjahit tersebut.

Matrik 3.6
Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Menjahit

Responden	Peran dalam Pelatihan	
	Praktek	Mengemukakan Pendapat
Bapak Agus Istanto	Mempraktekkan segala urutan dalam materi pelatihan menjahit	Sering
Bapak Agus Wiranto	Mempraktekkan segala urutan dalam materi pelatihan menjahit dan berhasil menyelesaikan pakaian	Sering
Ibu Sri Mulyani	Tidak ikut pelatihan sama sekali	Tidak ikut pelatihan sama sekali

Para peserta pelatihan menjahit diberi kesempatan untuk dapat mempraktekkan secara langsung materi yang diajarkan oleh instruktur, tidak. Karena semua bahan dan alat jahit disediakan oleh panitia, sehingga peserta bisa memanfaatkannya. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai bagi para peserta maka partisipasi peserta akan sangat terlihat. Responden dalam penelitian ini terlihat mampu mempraktekkan disamping satu responden yang sama sekali tidak mengikuti pelatihan karena suaminya sedang sakit. Tidak ada perbedaan antar peserta perempuan dan laki-laki dalam pelatihan ini, walaupun didominasi oleh peserta perempuan tetapi semua bisa praktek dan mengajukan pertanyaan. Di dalam pelatihan ini peserta dituntut untuk berpartisipasi secara aktif, jika tidak berpartisipasi secara aktif akan terlihat di akhir pelatihan. Jika peserta mampu membuat pakaian yang sesuai dengan model pelatihan maka

commit to user

peserta itu adalah peserta yang berpartisipasi aktif karena hasil akhir dari materi pelatihan menjahit ini adalah peserta mampu membuat pakaian dengan model yang telah ditentukan dari awal.

B.2.3 Pelatihan tata rias

Sebanyak 19 peserta ikut bagian di dalam kelompok pelatihan tata rias ini. Kelompok ini didominasi oleh peserta perempuan. Sama dengan pelatihan yang lain, pelatihan pada kelompok tata rias ini juga terdapat instruktur yang nantinya memberikan pengarahan dan menyampaikan materi kepada peserta dan menyuruh peserta untuk mempraktekannya. Peserta juga tidak perlu repot membawa peralatan atau alat-alat make up, karena panitia sudah menyediakan segala peralatan yang nantinya akan digunakan untuk praktek merias bagi para peserta. Untuk bisa menyerap materi yang disampaikan oleh instruktur, maka partisipasi peserta dalam praktek sangat dibutuhkan. Maka di dalam pelatihan merias ini, peserta ditekankan untuk bisa mempraktekkan materi yang disampaikan oleh instruktur.

Ibu Ning Hartini sebagai ketua kelompok tata rias yang juga sebagai peserta mengungkapkan mengenai kegiatan yang dilakukan selama pelatihan, bahwa :

“Memasak, menjahit, rias, becak ndandani. Kalau tata rias sendiri ya nyanggul, motong rambut, make up. Semua bisa praktek, yang penting bawa model sendiri. Kalau gak ada model ya gak bisa praktek, nanti instruktur yang keliling ngajarnya. Nanti yang jadi modelnya gantian antar peserta. Bebas mengutarakan pendapat dan memilih pelatihan sesuai dengan pelatihannya yang penting harus

sesuai. Kalau dirias juga harus tanya tentang rias.”
(wawancara 13 Agustus 2011)

Sementara Ibu Suranti salah seorang peserta tat rias juga mengungkapkan hal yang mendukung perihal kegiatan yang dilakukannya saat mengikuti pelatihan tata rias, bahwa :

“Di ajari make up ngrias, nyanggul peserta lain. Kulo mboten pernah praktek langsung tapi kulo dadi sing dirias kaliyan ibu-ibu, soale kulo mboten pernah mbeto conto model, kan sing saged praktek sing mbeto conto model piyambak, sing mboten mbeto nggih mengke dadi sing di make up napa di sanggul. Tapi mengke nggih gantian kaliyan peserta lain. Tapi modele nggih sami. Kulo nggih mboten pernah tanglet kalih instruktur, sing penting manut kalih sing ngrias.” (Di ajari make up merias, menyanggul peserta lain. Saya tidak pernah praktek langsung tapi saya yang dirias oleh ibu-ibu, karena saya tidak pernah membawa contoh model, karena yang bisa praktek yang membawa contoh model sendiri, yang tidak membawa nanti jadi yang di make up atau disanggul. Tapi nanti ya gantian dengan peserta lain. Tapi modele ya sama. Saya tidak pernah tanya dengan instruktur, yang penting nurut dengan yang merias/ wawancara 15 Agustus 2011)

Berdasarkan hal tersebut di atas maka bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi di dalam pelatihan tata rias adalah partisipasi yang efektif, karena pelatihan tersebut telah mewujudkan seluruh tujuan yang mengusahakan aktifitas partisipasi. Peserta dianjurkan untuk membawa model sendiri dan mempratekkan dengan teman sesama peserta yang menjadi model dan nanti bergantian. Semua peserta bisa berpartisipasi tanpa ada yang membatasi.

Matrik 3.7
Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan tata Rias

Responden	Peran dalam Pelatihan	
	Praktek	Mengemukakan Pendapat
Ibu Ning Hartini	Mempraktekkan cara merias sesuai dengan model yang dibawa	Tanya tentang merias yang baik
Ibu Suranti	Menjadi model yang dirias para peserta yang membawa model	Tidak pernah bertanya

Tampak sangat jelas jika partisipasi peserta tata rias sangat antusias dalam mengikuti pelatihan P2MBG ini. Peserta bisa mempraktekkan model yang diinginkan dan nantinya instruktur yang akan mengarahkan para peserta. Tidak hanya para peserta yang membawa model saja yang bisa berpartisipasi dengan praktek, tetapi peserta yang lain pun masih bisa berpartisipasi dengan cara menjadi model yang akan dirias oleh sesama peserta. Karena tidak mungkin kegiatan pelatihan merias hanya sekedar teori saja tanpa mempraktekkannya. Jadi terdapat hubungan yang sangat baik antara peserta satu dengan yang lain. Dibuktikan dengan saling bergantian menjadi model untuk dirias atau disanggul.

B.2.4 Pelatihan bengkel

Pelatihan bengkel sering disebut oleh para peserta P2MBG dengan sebutan pelatihan becak dikarenakan memang nanti bantuan yang diberikan adalah berupa becak. Pelatihan bengkel diikuti oleh 11 peserta dan semuanya adalah laki-laki. Di dalam pelatihannya yang digelar

bersama-sama dengan pelatihan yang lain, pelatihan bengkel jarang sekali ada pelatihan atau praktek tentang bengkel dan memperbaiki. Dikarenakan memang becak yang sebagai alat untuk praktek bengkel tidak langsung ada saat waktu pelatihan. Bukan hanya becak yang belum tersedia tapi juga peralatan lain seperti oneng, kunci inggris dan peralatan lain yang untuk bengkel belum tersedia juga.

Ini seperti yang diungkapkan oleh Pak widodo ketua kelompok bengkel dan peserta bengkel yang juga ditunjuk untuk menjadi instruktur pelatihan bengkel seputar kegiatan dalam pelatihan becak, bahwa :

“Ajar mbengkel, mbukak ban, masang rantai becak. Tapi malah asline nggih kulo mboten ngajari napa-napa, lha sing diajari napa lha wong becak kalih kuncine nembe enten pun pas tengah-tengah pelatihan. Pesertanipun nggih mung nonton mawon, lha pesertane niku kathah sing mbecak dadine nggih pun mudheng babagan ngeten niku. Kulo seminggu niku ming ngajari ping tiga tok. Malah kathah rembugan bareng Bu Endang ketimbang praktek.” (belajar bengkel, membuka ban, memasng rantaibecak. Tetapi sebenarnya ya saya tidak mengajari apa-apa, lah yang diajari apa karena becak dan kuncinya baru datang saat di tengah-tengah pelatihan. Pesertanya juga hanya melihat, lha pesertanyaitu banyak yang tukang becak jadi ya sudah tahu perihal seperti itu. Saya seminggu hanya melatih tiga kali saja)

(wawancara 15 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan Pak Rejeb salah seorang peserta pelatihan bengkel, bahwa :

“Bongkar pasang becak, mbukak ban, intruktur dari warga sendiri (Pak Widodo). Peserta boleh praktek, yen kulo nonton mawon (melihat saja) karena sudah bisa sebelumnya, tidak pernah tanya karena sudah bisa. Bisa memilih sendiri tanpa ada paksaan, dan tidak pernah pindah-pindah.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Matrik 3.8

Keterlibatan Peserta dalam Pelatihan Bengkel

Responden	Peran dalam Pelatihan	
	Praktek	Mengemukakan Pendapat
Pak Widodo	Mengajari para peserta untuk memperbaiki becak	Pak Widodo sebagai instruktur pelatihan bengkel jadi harus melayani pertanyaan peserta
Pak Rejeb	Tidak praktek dan hanya melihat saja karena sudah bisa	Tidak pernah bertanya karena sudah bisa

Dari pernyataan di atas memang diketahui jika memang partisipasi peserta pelatihan bengkel tidak maksimal. Peserta tidak dapat praktek karena tidak adanya peralatan dikarenakan terlambatnya kedatangan becak dan alat-alatnya. Ditambah peserta hanya melihat saja saat ada pelatihan karena memang kebanyakan peserta adalah tukang becak dan peserta sudah merasa bisa sekaligus tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Kebanyakan waktu untuk latihan sering digunakan untuk konsultasi dengan Ibu Endang Sri Anti dari Bapermas. Maka bentuk partisipasi masyarakat yang didapat dari pelatihan bengkel ini adalah partisipasi yang tidak efektif karena tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan praktek kepada peserta akan tetapi tidak dianggapi dengan baik oleh peserta karena menganggap sudah bisa, ditambah peralatan yang terlambat sehingga membuat peserta tidak ada kegiatan sama sekali. *commit to user*

Matrik 3.9
Bentuk Partisipasi Masyarakat di Dalam Pelaksanaan Program

NO	Jenis Pelatihan	Bentuk Partisipasi masyarakat	Uraian
1	Memasak	Partisipasi masyarakat yang sebagian dan terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Karena memang para peserta pelatihan memasak tidak langsung terlibat dalam proses pelatihan maka semuanya bisa mempraktekkan materi yang diajarkan membantu instruktur untuk membuat masakan tersebut. • Kendala terbatasnya alat praktek juga menyebabkan semuanya bisa praktek langsung
		Partisipasi masyarakat yang tidak langsung,	dikarenakan terdapat beberapa peserta khususnya perempuan mendelegasikan haknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kepada istrinya untuk mengikuti kegiatan pelatihan
2	Menjahit	Partisipasi masyarakat langsung	Karena peserta bisa dan melaksanakan kegiatan praktek menjahit.
		Partisipasi masyarakat yang sebagian tersebut.	dikarenakan adanya beberapa peserta yang tidak aktif menjahit, peserta tersebut dapat alat dan disediakan sekedar melihat, mendengarkan dan sesekali mencoba hasilnya mereka tidak mampu menyelesaikan pakaian akhir dari materi pelatihan menjahit
3	Tata Rias	Partisipasi yang efektif.	karena pelatihan tersebut telah mewujudkan seluruh mengusahakan aktifitas partisipasi. Peserta dianjurkan sendiri dan mempraktekkan dengan teman sesama peserta dan nanti bergantian. Semua peserta bisa berpartisipasi membatasi.
4	Bengkel	Partisipasi yang tidak efektif	karena tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membiasakan praktek kepada peserta akan tetapi tidak di tanggapi karena menganggap sudah bisa, ditambah peralatan

B.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Kegiatan P2MBG

Secara umum tujuan dari Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan. Di dalam pelaksanaan P2MBG di kelurahan Panularan, setelah masyarakat atau peserta dibina dan diberi pelatihan secukupnya, maka peserta P2MBG di Kelurahan Panularan akan menerima bantuan berupa peralatan sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti.

Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

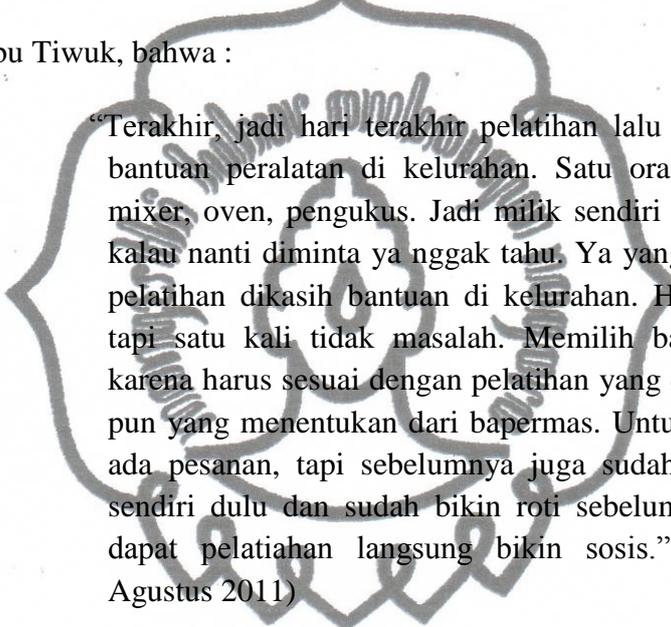
“Setelah pelatihan tersebut selanjutnya adalah pemberian bantuan sesuai dengan kegiatan pelatihan yang peserta ikuti.”
(wawancara 14 Juli 2011)

Pemberian bantuan peralatan ini bertujuan sebagai modal bagi peserta untuk mengembangkan dan membuka usaha terkait dengan pelatihan yang telah mereka ikuti. Peserta bebas menggunakan bantuan tersebut karena memang bantuan tersebut sudah merupakan milik peserta sepenuhnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kasubid Pemberdayaan perempuan Bapermas Kota Surakarta Ibu Endang Sri Anti, bahwa :

“Setiap peserta mengikuti sosialisasi, pelatihan secara tertib dan selalu hadir itu adalah calon penerima bantuan. Dari 100

peserta itu dapat semua. Tapi ya ada masyarakat itu yang ikut hanya karena ingin medndapat bantuan, padahal kegiatan ini sangat efektif. Jadi milik peserta sepenuhnya dipakai untuk mendukung usahanya”. (wawancara 14 Juli 2011)

Para peserta juga menambahkan jika bantuan tersebut memang menjadi milik pribadi dan para peserta sudah menunjukkan partisipasi mereka seusiai mendapatkan bantuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Tiwuk, bahwa :



“Terakhir, jadi hari terakhir pelatihan lalu besoknya dikasih bantuan peralatan di kelurahan. Satu orang satu set yaitu mixer, oven, pengukus. Jadi milik sendiri kelihatannya, tapi kalau nanti diminta ya nggak tahu. Ya yang ndftar terus ikut pelatihan dikasih bantuan di kelurahan. Harus dateng rutin tapi satu kali tidak masalah. Memilih bantuan tidak bisa karena harus sesuai dengan pelatihan yang diikuti, barangnya pun yang menentukan dari bapermas. Untuk bikin roti kalau ada pesanan, tapi sebelumnya juga sudah punya peralatan sendiri dulu dan sudah bikin roti sebelumnya, tapi setelah dapat pelatihan langsung bikin sosis.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Ning Hartini perihal bantuan dan pemanfaatannya, bahwa :

“Terakhir, jadi hari terakhir pelatihan lalu besoknya dikasih bantuan peralatan di kelurahan. Pembersih, penyegar, bedak tabur, sikat potong, gunting, sanggul, catok rambut. Jadi milik pribadi. Sudah digunakan untuk tambah-tambah usaha di rumah.”(wawancara 13 Agustus 2011)

Sementara Ibu Margini juga menambahkan tentang bantuan peralatan masak yang diterimanya, bahwa :

“Hari terakhir pelatihan lalu besoknya dikasih bantuan ada undangan, karena baru terakhir-terakhir dikasih tahu kalau dapat bantuan. Peserta masak angsal langsung, dandang,

blender, mixer, teflon, loyang. Jadi milik pribadi. Sudah digunakan untuk menerima pesenan arisan, tapi sebelumnya nggih (ya) sampun nerima pesanan, ngge (buat) nambah peralatan mawon.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Agus Istanto juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa :

“Bantuannya mesin jahit dikasih setelah hari terakhir pelatihan. Di Kelurahan. Jadi milik pribadi atau sendiri. Sudah, sudah saya gunakan untuk menjahit, tapi pengennya ke depan ya nerima jahitan dari tetangga sini saja.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Bapak Rejeb yang menerima bantuan becak juga mengungkapkan hal senada terkait bantuan yang telah diberikan, bahwa:

“Tidak ada syarat, pokoknya ikut pelatihan dapet bantuan, jadi milik pribadi tapi mboten ngerti yen mengke sewayah-wayah dijaluk melih. Tambah – tambah biaya hidup dengan membecak, sudah punya becak sebelum, yang bantuan disewakan.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Dari beberapa pernyataan di atas memang bantuan yang diberikan dalam P2MBG sudah digunakan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Terserah peserta mau menggunakan bantuan tersebut untuk membuka usaha apa. Peserta memang dituntut untuk sekreatif mungkin menggunakan bantuan tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Terdapat peserta yang menyewakan becak kepada orang lain merupakan bentuk kreatif dari peserta penerima bantuan. Bantuan tersebut juga dinilai sangat bermanfaat bagi penerimanya dikarenakan peserta tidak bisa melakukan usaha karena terkendala tidak mempunyai peralatan. Tetapi dengan adanya bantuan peralatan, peserta bisa menggunakan untuk membuka dan menyalurkan

bakat usahanya, bahkan bantuan tersebut juga digunakan sebagai penambah modal usaha karena sebelumnya peserta sudah membuka usaha dan sudah mempunyai peralatan tersebut.

Bantuan yang diberikan kepada peserta adalah pelatihan masak terdiri dari dua bantuan, yang pertama mendapatkan peralatan masak berupa teflon, dandang, mixer, oven dan alat untuk mengukus. Selain itu pelatihan masak juga memberikan gerobak. Bantuan untuk pelatihan tata rias adalah pembersih, penyegar, bedak tabur, sikat potong, gunting, sanggul, catok rambut. Bantuan untuk pelatihan menjahit berupa mesin jahit. Sementara bantuan untuk pelatihan bengkel adalah sebuah becak.

Bantuan peralatan yang diberikan secara gratis tidak serta-merta memuaskan para peserta P2MBG. Banyak yang mengeluh mengenai pemberian bantuan tersebut. Terutama dari para peserta pelatihan tata rias yang merasa bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Ning Hartini sebagai peserta tata rias mengungkapkan, bahwa :

“Belum sesuai karena barangnya sederhana masih kurang itu, seharusnya ya kalau mke up ya eye shadow, bedak tabur bedak padat, kalau nyanggul ya harus ada hairspray. Kalau bantuan ini cuma bahan dan alat yang dipakai untuk sehari-hari saja.” (wawancara 13 Agustus 2011)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Ibu Suranti salah satu dari peserta tata rias juga yang mengungkapkan, bahwa :

“Jelas kurang mas bantuannya, lha namung (cuma) pembersih, penyegar, bedak, gunting. Kulo kiro 9saya kira) dapet alat rias lengkap, nggen kangge (tempat untuk) keramas

creambath. Lha yen bantuan niku dereng saged ngge mbukak usaha dari nol mas?” (wawancara 15 Agustus 2011)

Belum sesuainya jenis bantuan dengan yang diinginkan oleh peserta menjadi suatu kendala sendiri untuk bisa menggunakan bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga dengan membuka usaha, terutama bagi para peserta yang belum mempunyai usaha sebelumnya alias dari nol. Bagi peserta yang sudah mempunyai usaha rias sebelumnya tidak terlalu menjadi masalah dikarenakan bantuan tersebut bisa digunakan untuk menambah alat-alat rias.

Pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan keinginan peserta tidak hanya dijumpai di dalam kelompok pelatihan tata rias saja, tetapi di dalam kelompok bengkel juga mengalami hal yang juga hampir serupa. Dikarenakan becak yang menjadi bantuan untuk para peserta pelatihan bengkel sangat tidak layak. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Rejeb selaku peserta bengkel yang menerima bantuan becak, bahwa:

“Belum sesuai dengan harapan karena becaknya bekas (sebagian baru dan rusak), cuma yang penting bisa jalan. Sudah protes, solusipun diberi biaya perbaikan 100 ribu, nikumen sebelumnya tidak diterima, terus enten sesepuh warga mriki sing nengahi kaliyan petugase, akhire nggih ditampi 100 ribu. Separo pas dinten niku separo sesuk esuke. Pemborongipun nggih sampun ngomong yen ampun di sebar-sebarke beritane, dadine nggih diparingi 100 ribu mau.” (wawancara 15 Agustus 2011)

Hal tersebut semakin dikuatkan oleh pernyataan dari Pak Widodo sebagai ketua kelompok bengkel sekaligus sebagai peserta, bahwa :

commit to user

“Pemberian bantuan becak marai rame mas, dari dateng mawon pun ketok yen becake niku mboten waras. Enten sing mboten saged digenjot, rantaine ucul, blabake sambungan, pun ketok bekas terus didandani mas? Rame nganti jam 7 bengi niku mas. Bapak-bapak niku ngoyak terus kalihan panitia, akhire diputuske dikasih uang pengganti kagem ndandani sebesar seratus ribu. Niku mawon direwangi rame, pemborongipun nganti dateng ngge njelaske. Lha lak ketok tow yen program niki enten permainan saking nduwur?” (Pemberian bantuan becak membuat ramai mas, dari datang saja sudah terlihat kalau becak itu tidak beres. Ada yang tidak bisa dikayuh, rantainya lepas, papannya sambungan, sudah terlihat bekas lalu diperbaiki mas? Ramai sampai jam 7 malam itu mas. Bapak-bapak ngejarar terus kepada panitia, akhirnya diputuskan diberi uang pengganti untuk memperbaiki sebesar seratus ribu. Itu saja dibarengi kisruh, pemborongnya samapai datang buat menjelaskan. Lha kan kelihatan kalau program ini ada permainan dari atas?) (wawancara 15 Agustus 2011)

Berdasarkan pernyataan di atas memang benar bahwa pemberian bantuan kepada peserta P2MBG banyak yang belum sesuai dengan kondisi yang layak. Peserta sampai protes dan mengakibatkan molornya pelaksanaan acara pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk dari kekesalan peserta karena merasa tidak dihargai. Walaupun memang itu merupakan bantuan yang menjadi hak para pemberinya, akan tetapi jika bantuan tersebut tidak layak maka peserta secara tidak langsung merasa dibohongi.

Dari peristiwa tersebut, tampak masyarakat peserta P2MBG sangat terlihat dalam kebersamaannya. Para peserta becak bersama-sama protes untuk menuntut keinginan mereka mendapatkan becak yang layak dapat terpenuhi. Kebersamaan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan

bentuk partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat yang terjadi adalah partisipasi masyarakat yang tidak terorganisasi. Partisipasi yang tidak terorganisasi di sini terjadi dikarenakan para peserta pelatihan bengkel bersama-sama berpartisipasi melayangkan protes supaya tuntutan mereka terpenuhi hanya dalam tempo yang tiba-tiba atau hanya datang saat terjadi peristiwa dan keadaan yang genting. Peristiwa di sini adalah pemberian bantuan yang tidak sesuai dan terkesan ala kadarnya membuat para peserta secara tidak langsung mengungkapkan kekecewaannya secara bersama.

Pemberian bantuan merupakan tahap akhir dari pelatihan P2MBG. Bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk digunakan oleh para peserta penerima sebagai modal membuka usaha. Dengan mampu membuka usaha sendiri maka diharapkan kondisi ekonomi keluarga para peserta bisa meningkat. Tetapi tidak semua bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota layak untuk dimanfaatkan para peserta. Bantuan berupa becak yang diterima oleh para peserta pelatihan bengkel sangat tidak layak karena bekas dan banyak yang dalam keadaan rusak. Sementara bantuan untuk peserta pelatihan tata rias sangat kurang bila tujuannya untuk membuka usaha, karena bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang dipakai untuk sehari-hari saja sudah habis. Akan tetapi berbeda pada pemberian bantuan peserta memasak dan pelatihan menjahit. Bantuan yang diberikan berupa gerobak, alat masak lengkap bagi pelatihan memasak dan mesin jahit bagi pelatihan menjahit sangat memuaskan. Karena bantuan yang diberikan

merupakan modal utama bagi para peserta pelatihan tersebut untuk bisa membuka usaha secara mandiri.

Matrik 3.10

Bentuk Partisipasi Masyarakat di Dalam Proses Pemanfaatan

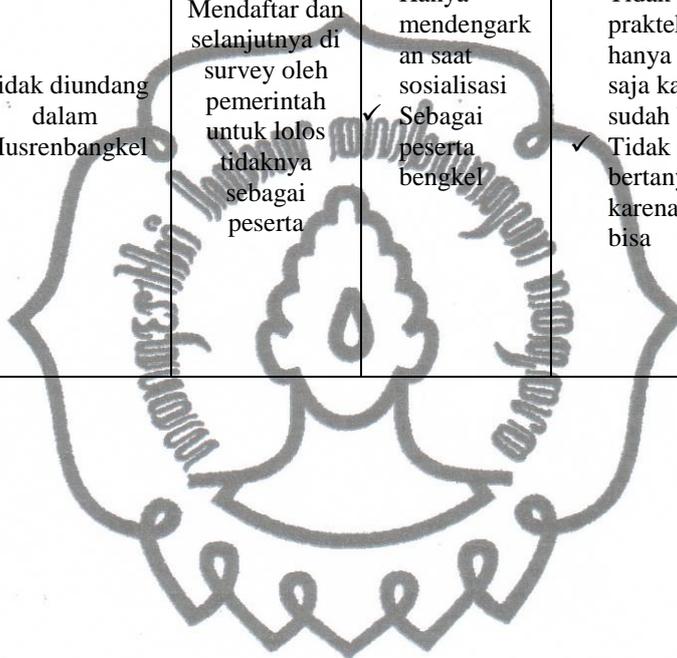
Kegiatan	Bentuk Partisipasi masyarakat	Uraian
Pemberian bantuan	Partisipasi masyarakat yang tidak terorganisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi yang tidak terorganisasi di sini terjadi dikarenakan para peserta pelatihan bengkel bersama-sama berpartisipasi melayangkan protes supaya tuntutan mereka terpenuhi hanya dalam tempo yang tiba-tiba atau hanya datang saat terjadi peristiwa dan keadaan yang genting. • Peristiwa di sini adalah pemberian bantuan yang tidak sesuai dan terkesan ala kadarnya membuat para peserta secara tdk langsung mengungkapkan kekecewaannya secara bersama.

Matrik 3.11
Partisipasi Peserta P2MBG Kelurahan Panularan

No	Peserta	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan	Pemanfaatan Program
		Penentuan Lokasi	Seleksi Peserta	Sosialisasi		
1.	Ibu Tiwuk	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam Musrenbangkel sebagai perwakilan perempuan ✓ Menyetujui hasil musyawarah penetapan Kegiatan P2MBG Kelurahan Panularan diselenggarakan di RW 8 	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu hadir dalam sosialisasi ✓ Sering bertanya ✓ Dipilih menjadi ketua kelompok memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempraktekkan materi memasak dengan cara membantu instruktur saat mendemonstrasikan materi ✓ Sering bertanya jika tidak tahu atau kurang mengerti materi yang disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan memasak
2.	Ibu Sri Handayani	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekali tidak hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan saat sosialisasi ✓ Menjadi peserta memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak pernah praktek saat pelatihan memasak ✓ Tidak pernah bertanya karena suasana saat pelatihan memasak yang ramai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan memasak
3.	Ibu Margini	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan saat sosialisasi ✓ Menjadi peserta memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Praktek memasak saat pelatihan dengan cara membantu instruktur saat mendemonstrasikan cara memasak ✓ Tanya tentang pembuatan kremes 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan memasak
4.	Ibu Ning Hartini	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekali tidak hadir dalam sosialisasi ✓ Mengusulkan pelatihan menjahit ✓ Dipilih menjadi ketua kelompok tata rias 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu membawa contoh model yang akan dipraktekkan sendiri ✓ Mempraktekkan merias dan menyanggul sesuai dengan model yang dibawa ✓ Bertanya kepada instruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan merias

					merias yang baik	
5.	Ibu Suranti	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekali tidak hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan saat sosialisasi karena malu ✓ Sebagai peserta tata rias 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak pernah membawa model sendiri ✓ Menjadi model yang dirias para peserta ✓ Tidak pernah bertanya kepada instruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan untuk merias
6.	Ibu Sri Mulyani	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan saat sosialisasi ✓ Sebagai peserta menjahit 	Tidak mengikuti pelatihan menjahit sama sekali karena suami sedang sakit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan untuk menjahit
7.	Bapak Agus Istanto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam Musrenbangkel sebagai Ketua RT 2 ✓ Menyetujui hasil musyawarah penetapan Kegiatan P2MBG Kelurahan Panularan diselenggarakan di RW 8 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mendaftar ✓ Di survey pemerintah ✓ Ikut membantu jalannya survey bagi Warga di RT 2 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sekali tidak hadir dalam sosialisasi ✓ Sering bertanya dan usul ✓ Sebagai peserta menjahit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu mempraktekkan segala urutan dalam materi pelatihan menjahit ✓ Sering bertanya kepada instruktur 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan menjahit
8.	Bapak Agus Wiranto	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan saat sosialisasi ✓ Sebagai peserta menjahit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempraktekkan segala urutan dalam materi pelatihan menjahit dan berhasil menyelesaikan pakaian ✓ Sering bertanya kepada instruktur supaya tidak ketinggalan materi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan peralatan menjahit
9.	Bapak Widodo	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Selalu hadir dalam sosialisasi ✓ Sering bertanya dan usul tentang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengajari para peserta untuk memperbaiki becak karena ditunjuk sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan becak

			peserta	pelatihan bengkel ✓ Sebagai ketua kelompok bengkel	instruktur ✓ Melayani pertanyaan para peserta	dan bersama-sama peserta bengkel lain menuntut kepada penyelenggara untuk mendapat bantuan yang layak.
10.	Bapak Rejeb	Tidak diundang dalam Musrenbangkel	Mendaftar dan selanjutnya di survey oleh pemerintah untuk lolos tidaknya sebagai peserta	✓ Kadang-kadang hadir dalam sosialisasi ✓ Hanya mendengarkan an saat sosialisasi ✓ Sebagai peserta bengkel	✓ Tidak pernah praktek dan hanya melihat saja karena sudah bisa ✓ Tidak pernah bertanya karena sudah bisa	✓ Hadir dalam acara penyerahan bantuan di kelurahan ✓ Mendapatkan bantuan becak dan bersama-sama peserta bengkel lain menuntut kepada penyelenggara untuk mendapat bantuan yang layak.



C. ANALISIS TEORI

C.1 Teori tindakan sosial voluntaristik

Seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons (dalam Doyle Paul Johnson, 1986), yang menyatakan aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut Parson sebagai *voluntarism*. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya

Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi yang penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Tetapi di sebelah itu aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif.

Untuk memudahkan analisis di mana penulis menggunakan teori voluntarisme dalam menganalisis partisipasi masyarakat RW 8 kelurahan panularan khususnya peserta Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG). Penulis menempatkan para peserta P2MBG sebagai aktor seperti yang diungkapkan dalam teori volunterisme di atas. Aktor yang menurut Parsons harus aktif dan kreatif sudah nampak didalam para fasilitator dan peserta P2MBG di Kelurahan Panularan ini.

Peran para peserta dalam mengambil tindakan memilih para ketua kelompok adalah hal yang patut dicermati. Para ketua kelompok yang juga sebagai peserta sangat aktif terlibat dalam membantu pelaksanaan P2MBG tersebut. Bisa dilihat dari peran mereka dalam menyebarkan informasi melalui undangan terkait jadwal pelaksanaan P2MBG. Fasilitator tersebut juga mampu berbaur dan mendampingi para peserta dalam musyawarah dan saat kegiatan sosialisasi P2MBG. Lewat ketua kelompok juga para peserta menyalurkan partisipasinya dengan mendaftar jenis pelatihan apa yang akan diikuti. Terlebih ketua kelompok di dalam P2MBG yang terpilih merupakan hasil dari partisipasi dari peserta lewat musyawarah bersama. Lalu ketua kelompok tersebut juga dengan suka rela mau menerima tugas dan peran tersebut. Peserta di dalam P2MBG di Kelurahan Panularan ini juga aktif, dilihat dari kehadiran peserta di dalam seluruh kegiatan P2MBG dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Kesukarelaan juga terpampang dari para peserta yang tidak perlu dipaksa untuk mengikuti P2MBG di Kelurahan panularan. Walaupun tidak ada aturan yang mengikat dan memaksa para peserta untuk selalu mengikuti kegiatan P2MBG para peserta tetap melaksanakan kewajibannya untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan. Untuk itu peran aktif dari ketua kelompok akan nampak karena ketua kelompok juga berperan untuk menggiring para peserta supaya bisa mengikuti setiap kegiatan.

Peserta juga bertindak aktif ketika mengungkapkan usul dan pendapat di semua kegiatan P2MBG, walaupun tidak semuanya mengajukan pendapat. Dengan adanya pendapat dan usul yang dilontarkan oleh peserta, maka partisipasi masyarakat sangat berjalan dengan baik. Bentuk kreatif peserta juga terlihat dari kegiatan pelatihan dengan menguasai materi dan memanfaatkan

bantuan untuk mengaplikasikannya menjadi suatu usaha yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Tetapi juga terlihat para peserta hanya menanti dan ikut pada keputusan dari pemerintah yang di dalam program ini diwakili oleh Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai penyelenggara P2MBG. Seperti pada penyelenggaraan sosialisasi P2MBG, di mana jadwal dan acaranya sepenuhnya diatur oleh penyelenggara. Sementara para peserta nantinya hanya sekedar mengikuti dan ikut pada putusan- putusan yang telah ditetapkan dari penyelenggara. Seperti penyelenggaraan jenis pelatihan memasak, tata rias, menjahit dan bengkel yang secara tidak langsung sudah diatur sebelumnya oleh Bapermas. Setidaknya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG) mampu membuat masyarakat di RW 8 Kelurahan Panularan berpartisipasi mendukung kelancaran program tersebut dan tujuan umum dari program ini untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan bisa tercapai melalui pemanfaatan bantuan yang telah diberikan.

C.2 Kerangka kerja Longwe

Tabel 3.1
Profil Gender dalam P2MBG di Kelurahan Panularan

Sektor	Proyek	Kesejahteraan	Akses	Penyadaran	Partisipasi	Kontrol
Pendidikan dan Pelatihan	P2MBG	Untuk kesejahteraan laki – laki maupun perempuan	Semua dapat mengakses baik laki-laki maupun perempuan	Tidak ada perbedaan antara laki – laki dan perempuan dalam mengikuti program dan memilih pelatihannya	Tingkat partisipasi lebih banyak perempuan	Kontrol dari pemerintah

Sumber: Hasil penelitian

a. Dimensi kesejahteraan

Pada dasarnya dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan materiil yang diukur dengan tercukupinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, penghasilan, perumahan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, ukuran materiil demikian tidak dapat dilihat dengan jelas dalam kegiatan P2MBG ini. Melalui program P2MBG di Kelurahan Panularan bisa untuk mengangkat kualitas hidup keluarga dan menyejahterakan melalui pelatihan dan bantuan dari pemerintah. Pada umumnya para peserta wanita yang mengikuti P2MBG ini berangkat dari rasa ingin tahu, cari pengalaman lewat P2MBG dan mempunyai tujuan untuk menambah pendapatan keluarga disamping hanya mengandalkan pendapatan dari suami saja.

Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan materiil antara peserta wanita dan peserta laki-laki dalam P2MBG ini. Semua peserta baik laki-laki maupun perempuan bisa mendapatkan bantuan untuk mendukung *commit to user* kebutuhan materiil mereka. Yang membedakan adalah jenis bantuan yang

mereka terima untuk dijadikan modal usaha. Tetapi tidak terdapat kesenjangan gender dalam perbedaan jenis bantuan yang diterima, karena memang setiap peserta menerima jenis bantuan yang berbeda satu sama lainnya sesuai dengan jenis pelatihan yang diikutinya.

Sebenarnya para peserta baik peserta perempuan atau laki-laki sudah mampu menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi dan menjadikan tambahan pendapatannya. Dilihat dari beberapa peserta yang berhasil diwawancarai sudah mengaplikasikan materi dan bantuan yang di dapat melalui P2MBG. Seperti para peserta perempuan yang sudah mulai bisa mandiri di dalam membuka usahanya dengan mampu menerima pesanan makanan, pesanan jasa menjahit, merias. Begitu pula dengan peserta laki-laki yang juga mampu untuk mengaplikasikan materi dan bantuan yang diterima selama mengikuti kegiatan P2MBG seperti menambah pendapatan dengan menyewakan becak dan menerima jasa menjahit pakaian. Semua peserta sudah bisa memanfaatkan semua yang telah diberikan melalui P2MBG.

Dengan sudah bisa mengaplikasikan materi dan bantuan dengan cara membuka usaha, bisa dikatakan kesejahteraan para peserta baik perempuan maupun laki-laki bisa meningkat. Sayang sekali belum adanya tahapan evaluasi dari penyelenggara Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta tidak bisa membantu melihat dengan jelas adanya peningkatan pendapatan yang ditimbulkan setelah adanya P2MBG dengan sebelum adanya P2MBG.

b. Dimensi akses

Para masyarakat miskin yang terdata di Kelurahan Panularan bisa mendaftar (ada seleksi dan pembatasan 100 peserta), mengikuti dan mengakses segala kegiatan dalam P2MBG, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pelatihan maupun dalam pemberian bantuan tanpa membedakan kaum laki – laki dan kaum perempuan tetapi harus mengikuti semua bentuk kegiatan terlebih dahulu. Para peserta baik perempuan maupun laki-laki juga dibebaskan mengikuti jenis pelatihan yang akan dan ingin diikuti. Semua peserta tanpa terkecuali diperbolehkan dalam mengutarakan pendapat atau usul di setiap kegiatan yang dilakukan selama kegiatan P2MBG berlangsung.

Terdapat pula peserta laki-laki yang mengikuti pelatihan menjahit, padahal masih banyak anggapan jika menjahit itu adalah pekerjaan para perempuan. Tetapi dengan para peserta laki-laki bisa mengakses dan mengikutinya maka dengan sendirinya membuktikan bahwa semua peserta bisa sesuka hati memilih apa yang ingin diikuti. Dengan sendirinya pemikiran atau stereotipe masyarakat akan kegiatan menjahit hanya dilakukan dan pantas dilakukan oleh perempuan akan terkikis. Tidak ada kesenjangan gender yang terjadi di dalam akses para peserta P2MBG di Kelurahan Panularan yang terdiri dari peserta perempuan dan laki-laki. Setiap peserta juga berhak aktif di dalam mengikuti P2MBG ini. Yang patut dicermati dari pelaksanaan P2MBG ini adalah banyaknya peserta perempuan yang terlibat dan banyak mengakses di dalam P2MBG ini saat mendaftar menggantikan atau mewakili para suami karena para suami tidak bisa meluangkan waktu karena kesibukan akan pekerjaannya membuat

tidak bisa mengikuti kegiatan P2MBG bukan menjadikan para perempuan justru menempatkan dirinya pada posisi subordinat di bawah kuasa laki-laki. Tetapi lewat P2MBG para suami ingin istrinya terlibat langsung di dalam program pemberdayaan masyarakat dan ingin para istrinya bisa membantu perekonomian keluarga dengan mengikuti P2MBG tersebut. Maka peran domestik (mengurus rumah tangga) yang saat ini melekat pada diri perempuan akan hilang lewat P2MBG. Terlebih para peserta perempuan juga bisa mengakses pada kesempatan mereka untuk menjadi fasilitator di dalam program ini. Dibuktikan dari 10 fasilitator, 8 fasilitator tersebut adalah perempuan dan para peserta laki-laki pun tidak memperlmasalahkannya.

c. Dimensi kesadaran kritis

Kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan kearah kesetaraan.

Di dalam P2MBG ini telah berhasil menghilangkan cara pandang yang menetapkan perempuan posisi sosialnya dan pembagian kerjanya lebih rendah daripada laki-laki. Tidak ada pengkhususan gender dalam

menentukan pelatihan yang diikuti di dalam kegiatan P2MBG ini. Sebagai contoh Bapak Agus Istanto yang mengikuti pelatihan menjahit, padahal hanya terdapat 5 orang laki – laki yang mengikuti pelatihan tersebut. Sehingga tidak ada pengkhususan dalam mengikuti pelatihan. Di dalam pelatihan ini tidak adanya kaum wanita di pelatihan bengkel karena memang mereka tidak berminat, karena penentuan mereka mengikuti pelatihan karena memang keinginan mereka sendiri.

d. Dimensi partisipasi

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi perempuan dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada kegiatan P2MBG. Partisipasi yang coba dilihat di sini adalah partisipasi kualitatif yang berkaitan dengan bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sejauh data yang dihimpun, partisipasi perempuan dan laki-laki terbilang aktif di setiap kegiatan yang di lakukan di dalam P2MBG. Pertama saat penentuan lokasi kegiatan P2MBG melalui musrenbangkel, pihak perempuan pun dilibatkan dalam acara tersebut. Saat proses perencanaan dalam sosialisasi dan musyawarah masyarakat, peserta perempuan dan laki-laki boleh dan berhak mengajukan usul tanpa ada paksaan atau batasan. Peserta perempuan pun bisa menjadi fasilitator di dalam P2MBG ini dan tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan di pelatihan menjahit yang menjadikan fasilitator adalah 2 (dua) orang perempuan dan mereka memimpin kelompok yang didalamnya terdapat peserta laki-laki, akan tetapi tidak ada masalah yang terjadi. Total peserta

perempuan bisa berpartisipasi menjadi fasilitator yang dipilih bersama sesama peserta dengan 8 (delapan) orang dari 10 fasilitator adalah perempuan. Menunjukkan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi.

Di dalam pelatihan pun baik peserta perempuan dan laki-laki bisa berpartisipasi dalam penyerapan materi dengan mencoba untuk mempraktekkan materi yang dilatih saat itu juga. Karena memang setiap peserta diberi kesempatan yang sama untuk praktek dengan alat dan bahan sudah disediakan panitia. Partisipasi perempuan terlihat sangat aktif pada pelatihan tata rias dengan bergantian praktek dan bergantian menjadi model bagi peserta yang lain. Semua peserta memang dituntut untuk aktif dalam P2MBG ini karena memang program ini adalah program pemberdayaan yang menuntut adanya partisipasi dari peserta. Tak bisa dipungkiri partisipasi perempuan lebih besar dalam P2MBG di kelurahan panularan, terlihat dari 100 (seratus) peserta 74 peserta adalah perempuan.

e. Dimensi kontrol

Kontrol dari P2MBG di Kelurahan Panularan ini sepenuhnya dari Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapermas PP,PA dan KB sebagai penyelenggara. Dimulai dari seleksi peserta yang harus sesuai dengan kriteria masyarakat miskin dari buku pedoman penyelenggaraan P2MBG. Sesuai dengan anggaran yang diterima penyelenggara, maka hanya dicari 100 (seratus) peserta saja tanpa membatasi jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan boleh mendaftar yang penting mau dan mampu melaksanakannya. Maka masyarakat yang tidak terpilih untuk dapat berpartisipasi dalam P2MBG tidak dapat berbuat apa-apa karena memang

itu sudah menjadi keputusan pemerintah menurut buku pedoman dan anggaran yang tersedia

Masyarakat peserta P2MBG di Kelurahan Panularan hanya dapat menentukan bentuk pelatihan apa yang akan dilakukan. Akan tetapi juga harus disesuaikan dengan anggaran dari Pemerintah Kota Surakarta terhadap P2MBG dan jenis pelatihan itu sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya oleh penyelenggara untuk menyalasati anggaran yang diterima. Jenis bantuan yang diterima oleh peserta pelatihan P2MBG di kelurahan Panularan juga penyelenggara yang mengatur. Banyak yang merasa iri karena adanya perbedaan yang mencolok antara bantuan yang diterima peserta jenis pelatihan satu dengan peserta jenis pelatihan yang lain. Peserta P2MBG hanya bisa menerima dan memiliki saja, kecuali pada peserta pelatihan bengkel yang mampu membuat penyelenggara sedikit mengeluarkan biaya lagi untuk meredakan protes peserta terkait bantuan yang diterima peserta bengkel yang terklesan asal-asalan. Kontrol pemerintah juga terlihat sangat kuat dalam pemberian bantuan kepada peserta, terdapat peserta yang tidak rutin mengikuti kegiatan P2MBG tetapi ternyata masih bisa mendapatkan bantuan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya pada bab ketiga ini dapat disimpulkan secara garis besar bahwa P2MBG yang dilaksanakan di RW 8 Kelurahan Panularan, Kota Surakarta dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Partisipasi masyarakat dalam P2MBG tersebut dapat dikatakan cukup baik.

Lewat P2MBG masyarakat di RW 8 Kelurahan Panularan diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri lewat pelatihan yang diselenggarakan dalam P2MBG. Peserta P2MBG Kelurahan Panularan yang merupakan masyarakat di RW 8 dapat meningkatkan kualitas hidup perekonomian keluarga lewat bantuan yang diberikan pemerintah kota. Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam P2MBG mengindikasikan munculnya paradigma pembangunan yang bersifat partisipatoris. Indikasinya dapat berupa pelibatan masyarakat setempat dalam perencanaan kegiatan yang meliputi pemilihan lokasi program, seleksi peserta, sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan kepada peserta berupa pelatihan memasak, menjahit, tata rias, bengkel serta pemberian bantuan dalam pemanfaatan program yang akan mengubah kualitas hidup keluarga mereka. Sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa partisipasi masyarakat setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai – nilai dan pengetahuannya

itu dipertimbangkan secara penuh. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun sudah tersalurkan secara langsung dan telah sampai kepada para peserta. Walaupun terdapat kendala dalam pemberian bantuan kepada peserta pelatihan bengkel, karena para peserta pelatihan bengkel menganggap bantuan becak yang diberikan sangat tidak layak (bekas). Keputusan untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 100.000,00 per peserta untuk mengganti biaya perbaikan becak menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

P2MBG di Kelurahan Panularan juga terselenggara dengan baik karena program ini melibatkan peserta laki-laki dan perempuan. Di dalam setiap rangkaian kegiatan P2MBG juga tidak ditemui adanya perbedaan perlakuan antara peserta laki-laki dengan peserta perempuan. Semua peserta bisa berpartisipasi secara baik dengan bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mengajukan pendapat atau usul dan menerima hasil maupun materi dalam P2MBG tanpa ada diskriminasi. Peserta P2MBG memang didominasi perempuan, tetapi hal itu bukan disebabkan karena adanya diskriminasi dalam penentuan peserta melainkan karena memang kebanyakan peserta yang mendaftar adalah perempuan.

Penulis juga menambahkan sebagai bentuk evaluasi dari pelaksanaan P2MBG di dalam kegiatan peningkatan pendapatan keluarga. Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan peningkatan pendapatan keluarga yaitu :

- Menumbuhkan motivasi berusaha.
- Menumbuhkan kemampuan manajemen usaha.

- Menumbuhkan kemampuan manajemen keuangan.
- Menumbuhkan keterampilan menjual.
- Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan berusaha.
- Meningkatkan akses pada modal dan informasi pasar.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut masih banyak yang belum tercapai. Khususnya pada informasi tentang pasar atau yang biasa disebut pemasaran. Para peserta yang mendapatkan bantuan dan sudah mulai membuka sebuah usaha seperti katering makanan, kesulitan untuk menyebarkan produknya. Saat ini hasil produksinya masih berkecukupan di lingkup RW saja. Pihak Bapermas Kota Surakarta juga belum terlihat untuk melakukan promosi kepada masyarakat luas. Sementara banyak bantuan becak yang disewakan karena memang kebanyakan dari peserta sudah mempunyai becak sendiri. Hanya pada sektor pemasaran ini yang menjadi hambatan para peserta P2MBG untuk menyalurkan produk hasil dari pelatihan P2MBG.

B. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Penulis menggunakan tipe-tipe partisipasi yang diutarakan oleh Dusseldorp untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam P2MBG di Kelurahan Panularan. Terdapat 9 (sembilan) bentuk partisipasi yaitu partisipasi bebas, berdasarkan cara keterlibatan, berdasarkan tingkatan di dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terencana,

berdasarkan tingkat organisasi, berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan, berdasarkan lingkup liputan kegiatan, berdasarkan efektifitas, berdasarkan siapa yang terlibat dan berdasarkan gaya partisipasi. Di dalam seluruh kegiatan pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan ditemukan beberapa bentuk partisipasi masyarakat. Memang tidak keseluruhan tipe-tipe partisipasi di atas ditemukan dalam penelitian ini. Tipe-tipe partisipasi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah partisipasi yang terpaksa, partisipasi spontan, partisipasi yang spontan, partisipasi sebagian dan terbatas, partisipasi tidak langsung, partisipasi langsung, partisipasi efektif, partisipasi tidak efektif dan partisipasi masyarakat yang tidak terorganisasi.

Teori tindakan sosial voluntaristik digunakan penulis untuk menganalisa data yang diperoleh. Aktor menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. Walaupun aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan Untuk memudahkan analisis di mana penulis menggunakan teori voluntarisme dalam menganalisis partisipasi masyarakat RW 8 Kelurahan Panularan khususnya peserta Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG). Penulis menempatkan para peserta P2MBG sebagai aktor seperti yang diungkapkan dalam teori volunterisme di atas. Aktor yang menurut

Parsons harus aktif dan kreatif sudah nampak didalam para ketua kelompok dan peserta P2MBG di Kelurahan Panularan ini.

Selain menggunakan teori tindakan sosial voluntaristik penulis juga menggunakan teknik analisa gender. Teknik yang digunakan adalah teknik Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut dengan kriteria pembangunan perempuan (*Women's Empowerment Criteria atau Women's Development Criteria*), adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Secara keseluruhan di dalam pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan ini tidak ditemukan adanya perbedaan ataupun kesenjangan gender. Semua peserta baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama. Lewat P2MBG memang diharapkan mampu mengikis isu gender yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki yang harus menafkahi keluarga, tetapi lewat P2MBG perempuan diupayakan untuk mampu meningkatkan kualitas perekonomian keluarga.

2. Implikasi metodologis

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk bagaimana partisipasi masyarakat warga Kelurahan Panularan Kota Surakarta dalam mengikuti Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2MBG). Sesuai dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti berperan

commit to user

sebagai instrumen dalam mencari dan mengumpulkan data lengkap, peneliti mencoba berinteraksi dengan masyarakat yang terlibat dengan P2MBG dan mengamati secara insentif pada subyek yang diteliti.

Responden dipilih berdasarkan *purposive sampling*. Dengan menggunakan tehnik ini, peneliti menggunakan pertimbangan bahwa responden yang diambil adalah yang memenuhi persyaratan untuk tujuan penelitian, yaitu masyarakat yang dianggap paling mengetahui yang kemudian dipakai sebagai responden. Dengan demikian langkah kedua adalah mewawancarai orang – orang yang telah disebut oleh informan pertama, kemudian yang ketiga kita dapat menarik responden yang semakin lama semakin banyak.

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan analisa interaktif. Proses ini diawali dengan pengumpulan data dengan wawancara mendalam observasi. Karena data yang diperoleh penulis berkembang dalam sajian data yang naratif.

Setelah pengumpulan data berakhir, tindakan peneliti selanjutnya adalah mencari kesimpulan dan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam pemilihan reduksi data dan sajian data. Secara metodologis, hasil penelitian akan mengungkap realitas secara mendalam sehingga memungkinkan memberi gambaran realitas mengenai partisipasi masyarakat di daerah Kelurahan Panularan Rw 8 sebagaimana adanya.

3. Implikasi empirik

I. Partisipasi Masyarakat dalam P2MBG

I.1 Perencanaan program

Partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program yang terdiri dari kegiatan penentuan lokasi, seleksi peserta dan sosialisasi tergolong cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peran masyarakat di setiap kegiatan tersebut seperti menghadiri, menyampaikan pendapat atau usul dan ikut dalam susunan acara yang telah diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Masyarakat sampai diadakan seleksi peserta membuktikan minat masyarakat yang akan mengikuti program ini (P2MBG) sangat besar.

I.2 Pelaksanaan program

Pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan dikatakan berhasil karena terlaksananya kegiatan pelatihan bagi para peserta seperti pelatihan memasak, menjahit, tata rias dan bengkel . Peserta mampu mempraktekkan materi yang disampaikan oleh instruktur supaya menjadi bekal dan tambahan wawasan bagi para peserta untuk meningkatkan ketrampilan para peserta. Semua fasilitas untuk menunjang kegiatan juga telah disiapkan oleh penyelenggara supaya membantu peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

I.3 Pemanfaatan program

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan melalui P2MBG sangat baik. Kebanyakan dari mereka sudah menggunakan bantuan tersebut untuk membuka usaha. Dituntut kreatifitas yang tinggi dalam menggunakan bantuan tersebut. Bantuan ada yang digunakan untuk menambah modal usaha karena memang masyarakat sudah mempunyai usaha sebelumnya dan ada juga yang menyewakan bantuannya kepada orang lain. Bantuan tersebut memang diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarga.

II. Hambatan

Penulis juga menemukan beberapa hambatan di dalam pelaksanaan P2MBG di Kelurahan Panularan. Hal – hal yang menjadi hambatan tersebut adalah :

- a. Tingkat kehadiran peserta yang berubah-ubah di setiap kegiatan karena adanya kesibukan dari peserta itu sendiri.
- b. Jadwal pelaksanaan yang dihelat pagi membuat banyak peserta maupaun para calon peserta terkendala pada jam kerja.
- c. Banyak peserta yang hanya mendengarkan dan mengikuti saja pada hasil pertemuan.

- d. Sempat terjadi rasa ketidakpuasan beberapa peserta terkait bantuan yang diterima yang terkesan seadanya.

C. SARAN

Dengan memperhatikan hasil penelitian yang didapat, penulis berusaha mengajukan saran, yang diharapkan saran tersebut dapat berguna sebagai masukan untuk pelaksanaan selanjutnya. Adapun saran tersebut antara lain :

1. Pemerintah diharapkan mampu menambah anggaran untuk menampung para masyarakat yang ingin berpartisipasi dengan mengikuti P2MBG. Karena anggaran yang terbatas sehingga hanya mampu menjangkau 100 (seratus) peserta, maka pada pelaksanaan yang akan datang mampu ditingkatkan jumlah pesertanya mengingat animo masyarakat yang ingin mengikuti P2MBG.
2. Karena program ini diperuntukkan untuk masyarakat, sudah seharusnya masyarakat tersebut dilibatkan dan ditanya pelatihan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, tidak ditentukan oleh pihak penyelenggara. Karena sebelumnya sudah diatur terlebih dulu pelatihan yang akan diberikan sesuai dengan anggaran.

3. Adanya koordinasi Pemerintah Kota Surakarta dengan peserta penerima bantuan, untuk mengetahui apakah bantuan sudah digunakan sebagaimana mestinya dan apakah sudah bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Karena selama ini belum adanya evaluasi menyebabkan ketidaktahuan apakah P2MBG ini tepat sasaran atau tidak.



DAFTAR PUSTAKA

- Glenn A. Bowen: "Community Development Journal" Vol 43 No 1 January 2008 pp.65 & Oxford University Press and Community Development Journal.2007.journals.permissions@oxfordjournal.org;doi:10.1093/cdj/b
sm011.Advance Access publication 26 April 2007.
- Handayani, Trisakti. 2008. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Jobs, Katja. 1997. *Participatory Monitoring and Evaluation Guidelines: Experiences in the Fields. St Vincent and the Grenadines*. Social Development Division Dissemination Note No.1. Department for International Development, UK.
- Mardikanto. 1989. *Komunikasi Pembangunan*. UNS Press Surakarta.
- Midgley, James. 1986. *Community Participation, Social Development And The State*. Methuen & Co. Ltd.
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. M.A. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Oxfam untuk Gender Learning Team. 1995. *Pisau Bedah Gender*.
- Paul Johnson, Doyle. 1986. *Teori sosiologi Klasik dan Modern*. PT Gramedia. Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J Goodman. 2008. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Singarimbun, Masri dan Sofian, Efendi (editor). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Slamet, Y. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Soemartoyo, S.R. 2002. *Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Peluang Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACT Seminar and Summit. Japan-Indonesia: Dynamic Relationship for Regional Development.
- Sutopo, Heribertus. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Pusat Penelitian UNS.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1999. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Widaningroem, R. 1998. *Metode Moser dan Aplikasinya. Makalah dalam Penelitian Teknik Analisis Gender*. Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.

Laporan Penelitian:

Lestari Hastuti, Endang. 2004. *Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia (socio-cultural constraints on gender mainstreaming in indonesia)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi. Bogor.

Sudirja, Rija. 2007. *Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Program Pembangunan Pertanian di Pedesaan*. Bandung.

Utari, Prahastiwi. 2008. *Laporan Penelitian: Penggunaan Teori dan Analisis Gender Dalam Skripsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2002-2007*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

